



Peran Vladimir Putin Dalam Proses Sekuritisasi Nilai Tradisional Untuk Menjustifikasi Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022

Taufik Muhammad Ramadhan¹, Made Panji Teguh Santoso², Nurbani Adine Gustianti³

^{1,2,3}Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang, Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 2 November 2025
Revised: 14 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Latar belakang penelitian ini adalah Perang Rusia dan Ukraina yang dimulai pada tahun 2022. Pada perang ini, Vladimir Putin menggunakan konsep Nilai Tradisional untuk menjustifikasi kebijakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Vladimir Putin dalam proses Sekuritisasi Nilai Tradisional untuk menjustifikasi invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Teori Konstruktivisme, Teori Sekuritisasi, Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Graham Allison, dan Teori Idiosinkratik untuk menganalisis Vladimir Putin sebagai individu yang mengeluarkan kebijakan kontroversial ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis data konten analisis (*content analysis*) terhadap pernyataan publik, pidato, dan tulisan Vladimir Putin. Penelitian ini menemukan bahwa Peran Vladimir Putin dalam proses Sekuritisasi Nilai Tradisional untuk menjustifikasi invasi Rusia ke Ukraina tahun 2021, bertujuan untuk membangun persepsi kepada publik bahwa kebijakan invasi ke Ukraina merupakan tindakan melindungi Rusia dari ancaman nilai-nilai liberal Barat. Kebijakan invasi ke Ukraina merupakan tindakan rasional karena memberikan keuntungan strategis bagi Rusia untuk mencegah ekspansi NATO ke Ukraina. Hasil analisis idiosinkratik menunjukkan bahwa Vladimir Putin termasuk kategori pemimpin yang agresif.

Keywords: Geopolitik, Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, Uni Eropa, Sekuritisasi, Konflik.

(*) Corresponding Author: 2110631260044@student.unsika.ac.id,
made.santoso@staff.unsika.ac.id, nurbani.adine@fisip.unsika.ac.id.

How to Cite: Ramadhan, T., Santoso, M., & Gustianti, N. (2025). Peran Vladimir Putin Dalam Proses Sekuritisasi Nilai Tradisional Untuk Menjustifikasi Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 419-452. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13544>.

INTRODUCTION

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia berkembang menjadi negara dengan ideologi dan kebudayaan yang berbeda dengan negara-negara barat pada umumnya, karena mengutamakan kedaulatan dan keamanan negara berdasarkan logika *zero-sum game*, yaitu keuntungan diperoleh dari kerugian pemain lain (Domańska, 2024). Hal ini sangatlah berlawanan dengan negara-negara barat yang lebih menekankan kesepakatan yang saling menguntungkan dan kooperatif (O'Hagan, 2023).

Pandangan Rusia terhadap dunia dapat diuraikan menjadi tiga penjelasan. Pertama, runtuhnya Uni Soviet merupakan tindakan pengkhianatan yang disebabkan oleh elit yang berkuasa dan pengaruh barat, oleh karena itu tidak boleh



dibiarkan terjadi lagi (Laruelle, 2024). Kedua, Rusia harus diakui sebagai negara adidaya yang berbeda demi mempertahankan diri dari tekanan barat (Laruelle, 2024). Ketiga, negara merupakan simbol bangsa Rusia, sehingga masyarakat harus mendukung secara penuh rezim dan memprioritaskan kepentingan negara di atas hak-hak individu (Laruelle, 2024). Ideologi yang dianut oleh negara Rusia dapat disebut sebagai konservatisme tradisional atau sering dikenal sebagai konservatisme klasik yang menekankan nilai-nilai tradisionanl dan identitas budaya Rusia sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme barat (Robinson, 2024).

Terdapat beberapa prinsip dari ideologi barat yang menurut pandangan Rusia mengancam eksistensinya di dunia. Misalnya, dalam hal tatanan internasional (*international order*), Amerika Serikat bersama negara-negara sekutunya sangat menekankan tatanan dunia yang liberal berlandaskan nilai universal dan praktik-praktik kebudayaan barat, sedangkan pandangan Rusia lebih meyakini tatanan dunia yang multipolar, karena setiap bangsa dan negara memiliki nilai dan tradisi tersendiri yang harus dipertahankan (Glantz, 2023). Selain itu, bagi Rusia nilai-nilai demokrasi liberal dan pluralisme dari barat dianggap sebagai ancaman asimetris terhadap nilai-nilai tradisional dan identitas budaya (Komin, 2024). Alasan kenapa Rusia menolak nilai-nilai demokrasi dari barat, bisa dijelaskan dari konteks kebudayaan dan historis. Perkembangan ideologi di Rusia berakar pada budaya kolektivisme yang sangat kontras dengan individualisme di negara-negara barat (Składanowski, 2024). Budaya kolektivisme di Rusia sangat erat dipandang sebagai nilai-nilai spiritual dan moral yang ada dalam masyarakat Rusia. hal inilah yang dianggap terancam oleh nilai-nilai liberalisme (Składanowski, 2024).

Pada kancah geopolitik, Rusia menjalankan strateginya dengan mentalitas *zero-sum game*, yaitu memandang hubungan internasional sebagai kompetisi yang harus mendominasi atau didominasi (Ferris, 2025). Mentalitas ini seringkali menyebabkan ketegangan geopolitik dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat serta isu-isu seperti ekspansi NATO (*The North Atlantic Treaty Organization*) dan gerakan demokrasi di negara-negara tetangga (Ferris, 2025). Kekhawatiran Rusia terhadap perkembangan demokrasi yang berdekatan langsung dengan negaranya merupakan bentuk dari ketakutan akan efek penularan politik atau yang sering disebut *political contagion* (Cuomo & Latypova, 2022). Rusia tidak ingin gelombang demokrasi mempengaruhi dan mengubah tatanan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakatnya (Cuomo & Latypova, 2022).

Pada konteks historis, ketakutan akan penyebaran demokrasi di Rusia memiliki hubungan dengan revolusi pro-demokrasi yang mengguncang negara-negara bekas pecahan Soviet di awal tahun 2000-an (Williams, 2023). Rusia menganggap pecahnya Uni Soviet merupakan tragedi yang sangat fatal bagi bangsanya (Osborn & Ostroukh, 2021). Sebagai salah satu bekas wilayah pecahan dari Uni Soviet, Ukraina berada di posisi yang diperebutkan oleh pengaruh Rusia dan negara-negara barat. Bagi Rusia, kedekatan budaya dan sejarah merupakan alasan yang logis untuk memperkuat pengaruhnya agar Ukraina tidak memihak ke Eropa dan Amerika Serikat (Myerson, 2023). Namun strategi ini tidaklah berjalan mulus, Ukraina memandang bahwa ketergantungan secara politik dan ekonomi terhadap Rusia tidaklah selalu menguntungkan (Massaguni, Badu, & Sallatu, 2022). Hubungan Rusia dan Ukraina pasca runtuhnya Uni Soviet mulai memburuk pada tahun pemilihan presiden 2004, pada saat itu kandidat presiden yang terpilih

ingin mengurangi ketergantungan Ukraina terhadap Rusia dengan mengintegrasikan Ukraina ke Uni Eropa dan NATO (Tsurkan, 2024). Terdapat beberapa penjelasan mengapa Ukraina akhirnya ingin lepas dari pengaruh Rusia, salah satunya adalah kurangnya identitas nasional masyarakat Ukraina karena masih dibayangi oleh sejarah Uni Soviet dan dominasi Rusia. Akibatnya, Ukraina sebagai negara sangatlah sulit untuk menentukan arah kebijakan politik di dalam maupun luar negeri yang akhirnya menghambat perkembangan ekonomi negara (Henke, 2021). Bukti bahwa masyarakat Ukraina ingin perubahan dari keterpurukan ini adalah gelombang-gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi dari kurun waktu tahun 2004 hingga 2014. Dua gerakan sipil yang memperlihatkan ambisi serius untuk lepas dari pengaruh Rusia terjadi pada *Orange Revolution* tahun 2004-2005 yang bertujuan untuk menjaga pemilihan umum presiden dari intervensi Rusia dan *Euromaidan* 2013-2014 yang merupakan bentuk protes masyarakat Ukraina terhadap pemerintahan saat itu atas pembatalan kerjasama Uni Eropa-Ukraina dan lebih memilih mendekatkan hubungan dengan Rusia (Dickinson, 2020).

Rusia melihat *Orange Revolution* dan *Euromaidan* sebagai bentuk kudeta yang didukung oleh negara-negara barat yang bertujuan untuk mendestabilisasi dan menghapuskan kedekatan budaya politik antara Ukraina dengan Rusia (Saeri, et al., 2023). Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa berusaha memperluas pengaruh di negara-negara bekas Soviet melalui dukungan gerakan-gerakan demokrasi (Masters, 2023). Respon tersebut merupakan perwujudan langsung dari ideologi Presiden Rusia Vladimir Putin, ia menyatakan bahwa ada 'batas' yang tidak boleh dilewati oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa pada Ukraina setelah terjadinya gerakan sipil *Euromaidan* (Masters, 2023).

Perkembangan ideologi Vladimir Putin diawali dengan fokus terhadap pendirian negara yang kuat dan stabil. Pada awal tahun 2000-an, Putin mengeluarkan kebijakan untuk memperkenalkan kembali sejarah kebanggaan bangsa Rusia dari jaman kekaisaraan hingga Uni Soviet untuk mendorong rasa patriotisme (Snegovaya, Kimmage, & McGlynn, 2023). Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh *Center for Strategic and International Studies* dengan judul *The Ideology of Putinism: Is It Sustainable?*, prinsip-prinsip ideologi Vladimir Putin dapat diuraikan menjadi enam poin (Snegovaya, Kimmage, & McGlynn, 2023). Prinsip pertama yaitu statisme atau bisa disebut etatisme, yang berarti terdapat keterikatan antara negara yang kuat dengan sejarahnya, Putin memposisikan dirinya sebagai aktor yang telah memulihkan negara Rusia ke masa kejayaannya seperti dulu. Kedua, Rusia akan selalu berada di bawah ancaman kekuatan-kekuatan besar, hal ini mengacu pada sejarah bangsa Rusia yang runtuh dua kali pada abad ke-20. Menurutnya, runtuhnya Uni Soviet merupakan titik dimana bangsa Rusia kehilangan identitas budayanya. Ketiga, prinsip kebijakan anti barat (*western*) yang didasarkan bahwa negara-negara barat merupakan ancaman eksistensial yang ingin menghancurkan Rusia dengan kekuatan dan degradasi moral. Keempat, Rusia harus menjaga budaya konservatisme dengan menekankan nilai-nilai tradisional sebagai penangkal gelombang paham-paham liberalisme. Putin beranggapan bahwa orang Rusia harus melihat diri mereka sendiri sebagai bangsa yang berakar pada budaya, berbeda dengan orang-orang Eropa yang dianggap telah kehilangan fondasi dengan menerima homoseksualitas,

feminisme, dan multikulturalisme. Kelima yaitu eksklusivisme Rusia dibandingkan dengan bangsa lain, Putin menyebutkan bahwa peradaban Rusia sangatlah unik karena menjunjung tinggi pengorbanan individu demi kepentingan negara. Terakhir, Rusia memiliki sejarah di Perang Dunia II yang akan selalu melekat pada identitas politik dan haknya untuk mendapatkan status negara adikuasa.

Prinsip-prinsip di atas membentuk kebijakan luar negeri Rusia yang koersif terhadap negara-negara tetangganya. Ukraina menjadi salah satu negara yang sangat diperhatikan oleh Vladimir Putin, dalam beberapa pidato, wawancara, dan tulisan, Ukraina sering disebut sebagai bagian dari peradaban Rusia karena kedekatan sejarah, budaya dan bahasa (Kremlin, 2021). Faktor inilah yang menyebabkan mengapa Putin menyebut demonstrasi yang terjadi di Ukraina seperti *Orange Revolution* dan *Euromaidan* disebabkan oleh aktor eksternal yang ingin mendestabilisasi yaitu Amerika Serikat dan Eropa (Graham, 2024). Konsep yang paling konsisten disebutkan oleh Vladimir Putin di beberapa pidato dan tulisannya semenjak tahun 2013 adalah konsep Nilai Tradisional (*Traditional Value*), ia menekankan bahwa nilai-nilai tradisional bangsa Rusia harus dijaga dan dilestarikan ditengah gelombang liberalisme (Beehner, 2022). Ketika terjadi demonstrasi besar di Ukraina pada tahun 2014 yang sering disebut *Revolution of Dignity*, Putin menganggap bahwa ada usaha untuk menghancurkan nilai dan budaya kelompok yang memihak Rusia di Ukraina. Anggapan tersebut merupakan salah satu narasi Vladimir Putin untuk melegitimasi Aneksasi Krimea pada tahun 2014 (Beehner, 2022). Pada peristiwa inilah yang menjadi awal Perang Rusia dan Ukraina, karena Ukraina terpecah menjadi dua kelompok yaitu pro barat dan pro Rusia. Vladimir Putin memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyuarakan dukungan terhadap kelompok yang tidak setuju Ukraina berubah haluan ke Eropa, ia menggunakan retorika bahwa Rusia merupakan negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan budaya dan identitas etnis Slavia yang merupakan mayoritas dari penduduk Rusia dan Ukraina (Person & McFaul, 2022). Perpecahan di Ukraina meningkat menjadi perang sipil antara kelompok bersenjata yang terbentuk dari para demonstran pro Rusia di wilayah Ukraina bagian timur yaitu Donbas dan Luhanks serta wilayah selatan dengan militer Ukraina (Council on Foreign Relations, 2022).

Pada kurun waktu tahun 2014-2021 Vladimir Putin telah membuat pernyataan yang menunjukkan pentingnya Ukraina bagi Rusia. Salah satu tulisan Putin yang sangat konkret tentang gagasannya terhadap Ukraina adalah esai yang berjudul *On the Historical Unity of Russians and Ukrainian*, tulisan tersebut di terbitkan di website pemerintahan Rusia pada tahun 2021. Didalamnya, Putin menuangkan gagasan dan pandangannya tentang Ukraina yang terbagi menjadi beberapa tema seperti keterikatan sejarah, kritik terhadap pemerintahan Ukraina, klaim teritorial dan ekspansi NATO (Kremlin, 2021). Terdapat beberapa sumber yang menganalisis alasan Putin membuat tulisan itu, misalnya pada artikel yang diterbitkan di *Council on Foreign Relations* dengan judul *What Does Putin Really Want in Ukraine?* Menjelaskan bahwa esai tersebut merupakan bentuk ultimatum terhadap Ukraina yang pasca aneksasi Krimea semakin erat menjalin kera sama ekonomi dan militer dengan anggota NATO (Graham, 2024). Putin memberikan peringatan tentang bahwa bergabungnya Ukraina menjadi anggota NATO merupakan '*red line*' yang tidak boleh sama sekali dilewati oleh pihak-pihak

manapun yang sedang berkepentingan di Ukraina (Graham, 2024). Hal ini juga yang menjadi sumbu utama terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Presiden Vladimir Putin mengumumkan invasi Rusia ke Ukraina yang ia sebut sebagai *special military operation* dalam pidato yang disiarkan di televisi. Dalam pidatonya, Putin menyatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya yang ia sebut '*collective west*', ingin menghancurkan prinsip dan nilai tradisional (*traditional value*) Rusia dan menggantikannya dengan nilai dan kebudayaan barat dengan mempengaruhi Ukraina agar lebih mengutamakan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Eropa hingga wacana keanggotaan NATO (Beehner, 2022). Menurut penulis, upaya legitimasi dan justifikasi invasi Ukraina menggunakan prinsip yang bersifat moral dan spiritual seperti nilai tradisional yang dilakukan oleh Putin sangat penting untuk dibahas karena dampak negatif dari perang ini sangatlah besar. Per 31 Januari 2025, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah memverifikasi total 41.783 korban sipil di Ukraina yang diakibatkan oleh invasi Rusia yang mencakup 12.605 korban tewas dan 29.178 korban luka-luka (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2025). Pada penelitian ini penulis akan menganalisis peran Vladimir Putin dalam menggunakan narasi dan konsep Nilai Tradisional untuk menjustifikasi invasi Ukraina menggunakan teori Konstruktivisme, Sekuritisasi, Pengambilan Kebijakan Luar Negeri, dan Idiosinkratik dengan judul *Peran Vladimir Putin Dalam Proses Sekuritisasi Nilai Tradisional Untuk Menjustifikasi Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022*.

METHODS

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan metode yang berfokus pada pemahaman "bagaimana" suatu fenomena dapat diinterpretasikan bagi peneliliti (Nunez, 2022). Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik *content analysis*, yaitu pemeriksaan dan penafsiran sistematis terhadap materi visual dan tekstual untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna (Berg dan Lune 2018). Untuk landasan teori, penelitian ini akan menggunakan Teori Konstruktivisme, Teori Sekuritisasi, Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri, dan Teori Idiosinkratik.

Konstruktivisme

Dalam studi Hubungan Internasional, Konstruktivisme merupakan teori yang menggunakan ide, identitas, dan interaksi sosial untuk memahami fenomena-fenomena politik global. Dalam definisi yang lain, Konstruktivisme berfokus pada bagaimana realitas di dalam hubungan internasional, dikonstruksi secara sosial dan bukan sebagai kondisi objektif yang tidak dapat diubah (McCourt, 2022). Orientasi teoritis ini merupakan perubahan signifikan dari pendekatan tradisional yang memperlakukan sifat anarkis dari sistem internasional sebagai suatu kondisi yang sudah ada dengan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, para konstruktivis berargumen bahwa anarki bukanlah fitur realitas internasional yang tidak dapat diubah (McCourt, 2022). Perspektif ini menunjukkan bahwa implikasi dari anarki bergantung pada bagaimana negara-negara berinteraksi dan menginterpretasikan kondisi tersebut. Oleh karena itu, konstruktivisme mengakui

adanya perubahan dalam hubungan internasional melalui transformasi identitas, kepentingan, dan pemahaman intersubjektif, bahkan di dalam sistem yang anarkis (McCourt , 2022).

Konstruktivisme berlandaskan pada beberapa premis dasar yang membedakannya dengan pendekatan-pendekatan lain dalam hubungan internasional. Premis pertama yang paling mendasar adalah bahwa realitas dunia termasuk politik internasional tidak bersifat obyektif, melainkan dikonstruksi secara sistematis melalui praktik-praktik sosial manusia (McCourt , 2022). Hal ini berarti bahwa struktur, institusi, dan pola interaksi yang dapat dilihat dalam politik global bukanlah sesuatu yang alamiah atau tak terhindarkan, tetapi merupakan hasil dari gagasan, keyakinan, dan tindakan kolektif manusia.

Premis kedua dari konstruktivisme adalah mengenai hubungan timbal balik antara agen dan struktur. Para konstruktivis berpendapat bahwa agen (negara, pemimpin, dan warga negara) dan struktur (sistem internasional, norma-norma global) secara terus menerus saling membentuk dan membangun kembali satu sama lain melalui interaksi mereka (McCourt , 2022).

Premis dasar ketiga dari konstruktivisme adalah bahwa identitas dan kepentingan dibangun secara sosial dan bukannya diberikan secara eksogen atau melekat pada para aktor (McCourt , 2022). Para konstruktivis menolak asumsi bahwa negara memiliki kepentingan yang tetap dan tidak berubah, seperti memaksimalkan kekuasaan atau memastikan kelangsungan hidup. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa apa yang diinginkan oleh negara dan bagaimana mereka mendefinisikan kepentingan mereka bergantung pada siapa mereka memahami diri mereka sendiri atau bisa disebut identitas (McCourt , 2022). Identitas-identitas ini tidak statis, tetapi dibentuk, dipertahankan, dan diubah melalui interaksi dengan aktor-aktor lain dan partisipasi dalam struktur sosial (McCourt , 2022).

Premis Konstruktivisme juga menyatakan bahwa bahasa tidak hanya menggambarkan apa yang ada di dunia, tetapi juga berperan dalam membentuk realitas sosial yang digambarkan (Hadiwinata, 2017). Misalnya, jika ada individu yang berulang kali menyebutkan negara tertentu sebagai “ancaman”, maka hal ini dapat membentuk opini publik hingga mempengaruhi keputusan politik yang cenderung negatif terhadap negara tersebut walaupun tidak ada bukti langsung (Hadiwinata, 2017).

Dari sudut pandang konstruktivis, identitas merupakan hal yang penting untuk memahami strategi Vladimir Putin dalam proses sekuritisasi ‘nilai tradisional. Identitas merupakan pemahaman diri yang relatif tetap berdasarkan peran dan ekspektasi dari orang lain, serta seperangkat persepsi tentang manusia, struktur sosial dan hal-hal yang bersifat normatif (Shahir & Boghairy, 2024). Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menganut sebuah model identitas sebagai aktor yang ingin menjaga karakteristik budaya dan sosial etnis Slavia dari pengaruh budaya negara-negara barat. Konstruksi identitas ini sengaja dikembangkan untuk memberikan penjelasan untuk melegitimasi penguatan dan perluasan kekuasaan Rusia di wilayah Ukraina.

Sekuritisasi

Sekuritisasi merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh para pakar dari Mazhab Kopenhagen. Literatur pertama tentang teori ini dibuat oleh Barry Buzan dan Ole Wæver dengan judul *Security: A New Framework for Analysis*.

Dalam literatur tersebut, Buzan dan Wæver mengategorikan Teori Sekuritisasi sebagai contoh dari Konstruktivisme Radikal (Mikelis, 2021). Dalam teori sekuritisasi, konsep keamanan adalah hasil dari proses konstruksi sosial yang berawal dari pernyataan (*speech act*) dari agen-agen berpengaruh yang disebut Aktor Sekuritisasi (*Securitizing Actor*) seperti pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat menyatakan bahwa ada sesuatu (*referent object*) yang menjadi ancaman eksistensial (*existential threats*) bagi individu maupun negara (Hadiwinata, 2017). Pernyataan ancaman tersebut disampaikan kepada publik sebagai target (*audience*), sehingga memperlakukannya sebagai isu keamanan yang mendesak serta mendukung upaya penyelesaian atau kebijakan yang khusus (Hadiwinata, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka teori ini mengikutip prinsip konstruksi sosial dari Konstruktivisme, yang berarti bahwa sesuatu menjadi ancaman keamanan hanya jika dibingkai sebagai ancaman keamanan melalui ucapan dan pembicaraan. Pada teori ini terdapat konsep aktor. tugas utama aktor sekuritisasi adalah meyakinkan publik (Hadiwinata, 2017). Dalam kasus yang diangkat penelitian ini, Vladimir Putin merupakan aktor sekuritisasi yang memanfaatkan Nilai Tradisional sebagai faktor pemersatu dalam menjustifikasi invasi ke Ukraina. Putin melalui pidato dan media menekankan ancaman ideologis Barat terhadap nilai tradisional Rusia dan memposisikannya sebagai pelindung.

Dalam pendekatan ini juga ada konsep proses sekuritisasi, yang diartikan sebagai upaya untuk menaikkan tingkat urgensi suatu isu dari yang tadinya sebuah isu politik menjadi isu keamanan melalui pernyataan (*speech act*) kepada publik melalui media, siaran pers, makalah, seminar, konferensi, dan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi (Hadiwinata, 2017). Vladimir Putin membingkai (*framing*) invasi Rusia ke Ukraina sebagai upaya mempertahankan Nilai Tradisional Rusia dari pengaruh ideologis dan budaya Barat. Langkah Putin juga secara implisit memindahkan wacana keberpihakan Ukraina ke Barat yang merupakan isu politik menjadi ancaman eksistensial bagi negara Rusia.

Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dan proses pengambilan keputusan yang menyertainya merupakan komponen fundamental dari aktivitas sebuah negara di panggung global (Sulaeman & Tiara, 2021). Menurut Graham Allison dalam bukunya yang berjudul *The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, terdapat 3 model bentuk pengambilan kebijakan luar negeri yaitu aktor rasional, politik birokrasi, dan organisasi (Elvira, 2021). Model aktor rasional (*Rational Actor Model*) mengacu pada asumsi bahwa aktor utama dalam kebijakan luar negeri adalah individu rasional yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan perhitungan yang memaksimalkan nilai serta manfaat yang dirasakan oleh negara (Elvira, 2021). Terdapat empat langkah utama dalam proses pengambilan keputusan aktor rasional yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan hasil yang diinginkan, mengevaluasi konsekuensi dari pilihan kebijakan dan membuat keputusan yang paling rasional untuk memaksimalkan hasil yang menguntungkan (Elvira, 2021).

Model politik birokrasi (*Bureaucratic/Governmental Politics*) menganalisis keputusan berdasarkan premis bahwa tindakan diambil oleh sejumlah entitas independen yang saling bersaing di dalam suatu negara. Masing-masing entitas yang terpisah ini membawa nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan, serta

pandangannya sendiri mengenai apa yang terbaik untuk kepentingan pribadi, organisasi, dan nasional (Wargi, 2021). Masing-masing pihak berusaha untuk memenuhi tujuannya, sehingga setiap tindakan kolektif bergantung pada negosiasi yang berhasil dan tercapainya konsensus akhir di antara semua pihak yang memilikir perbedaan pandangan politik maupun ideologi (Wargi, 2021). Terakhir yaitu model proses rganisasi (*organizational process*), berbeda dengan dua pendekatan yang disebutkan sebelumnya, model proses organisasi memandang pemerintah sebagai gabungan organisasi-organisasi kuat yang bekerja bersama, bukan sebagai individu atau sekelompok entitas perseorangan (Wargi, 2021).

Model ini mengkaji keputusan kebijakan luar negeri yang dibuat dalam batasan-batasan birokrasi yang ketat, di mana tindakan hanya dapat dilakukan dengan otorisasi yang tepat dan sesuai dengan rantai komando sesuai proses yang telah ditetapkan dan prosedur operasi standar. Di sini, para pemimpin pemerintah tidak menangani lingkup krisis yang lebih luas, melainkan mendelegasikan aspek-aspek yang lebih kecil dari masalah tersebut kepada komite, departemen, dan entitas birokrasi lainnya yang mendukung pemerintah (Wargi, 2021).

Keputusan Vladimir Putin untuk melakukan invasi ke Ukraina pada Tahun 2022 dikategorikan sebagai bentuk pengambilan kebijakan aktor rasional (*rational actor model*) karena Putin merupakan aktor utama yang membuat gagasan kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina. Hal tersebut tercanmtum secara langsung pada naskah esai yang dibuat langsung oleh Putin dengan judul *On the Historical Unity of Russians and Ukrainians*, dalam esai ini Vladimir Putin menyatakan bahwa Ukraina telah berubah menjadi negara yang diatur oleh pihak-pihak barat. Menurut Düben (2023) Esai Putin bukan hanya sebuah ulasan sejarah, tetapi merupakan landasan ideologis langsung bagi kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina. Di dalamnya disebutkan bahwa interpretasi Putin yang nasionalis dan cenderung memanfaatkan sejarah Rusia-Ukraina untuk memperkuat keyakinan bahwa Rusia harus merebut dan mengendalikan Ukraina, bahkan dengan risiko perang besar.

Teori Idiosinkratik

Teori Idiosinkratik didasarkan pada premis dasar bahwa karakteristik pribadi seorang pemimpin merupakan faktor penentu utama dalam perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan (Lewoema & Arisanto, 2024). Kerangka kerja teoretis ini mengembangkan pemahaman bahwa kebijakan di dalam suatu negara sering kali berasal dari keputusan individu para pemimpin, bukan semata-mata dari faktor institusional atau struktural. Margaret G. Hermann dalam karyanya yang berjudul *Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders*, mengembangkan pendekatan ini untuk memberikan gambaran perkiraan tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri terjadi melalui mekanisme psikologis (Lewoema & Arisanto, 2024). Teori ini memungkinkan para peneliti untuk mengungkap atribut pribadi seorang pemimpin yang dapat memengaruhi pembentukan kebijakan melalui analisis dan pemetaan terperinci dari proses psikologis dan kognitif yang terlibat dalam pengambilan keputusan kepemimpinan (Batubara, Rosyidin, & Hanura, 2021).

Hermann membagi enam indikator utama yang menjadi dasar analisis idiosinkratik dalam studi kepemimpinan (Lewoema & Arisanto, 2024). Indikator-

indikator ini memberikan dasar yang komprehensif untuk memahami bagaimana para pemimpin memproses informasi dan mengambil keputusan berdasarkan karakteristik psikologis yang melekat pada diri mereka. Setiap indikator mewakili aspek kepribadian yang berbeda yang termanifestasi dalam perilaku kepemimpinan dan pilihan kebijakan.

Indikator pertama yaitu *Nationalism*, mencirikan para pemimpin yang memosisikan negara mereka sebagai titik fokus perhatian dan proses pengambilan keputusan (Lewoema & Arisanto, 2024). Para pemimpin ini menunjukkan hubungan emosional yang kuat sehingga memotivasi mereka untuk melestarikan dan meningkatkan eksistensi serta identitas nasional mereka. Karakteristik ini sering kali muncul pada pemimpin yang memprioritaskan kepentingan nasional di atas kerja sama internasional.

Indikator kedua *Belief in Ability to Influence or Control Events*, mencerminkan keyakinan pemimpin mengenai kapasitas mereka untuk melakukan kontrol atas situasi (Lewoema & Arisanto, 2024). Pemimpin dengan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan ini umumnya mengadopsi pendekatan proaktif terhadap tata kelola, sering kali memulai tindakan daripada merespons keadaan. Para pemimpin ini cenderung mendelegasikan lebih sedikit wewenang kepada orang lain, dan lebih memilih untuk mengambil alih kendali atas berbagai peristiwa secara pribadi karena mereka yakin akan kemampuan mereka untuk mempengaruhi hasil yang menguntungkan. Keyakinan mereka dalam mengendalikan situasi sering kali membuat mereka resisten terhadap kompromi atau negosiasi dengan pihak lain (Lewoema & Arisanto, 2024). Sebaliknya, pemimpin yang memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah terhadap kemampuan mengendalikan situasi biasanya menunjukkan kecenderungan yang lebih reaktif, menilai situasi dengan hati-hati sebelum mengambil tindakan, dan kurang berinisiatif dalam situasi yang mereka anggap berada di luar pengaruh mereka (Lewoema & Arisanto, 2024).

Ketiga, *Need for Power and Influence* yaitu keinginan pemimpin untuk membangun kontrol dan dominasi di lingkungan mereka. Pemimpin dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi sering memanipulasi keadaan untuk mencapai kontrol dan muncul sebagai pemenang dalam situasi kompetitif (Lewoema & Arisanto, 2024). Proses pengambilan keputusan mereka memprioritaskan hasil yang memperkuat otoritas dan pengaruh mereka. Sebaliknya, pemimpin dengan kebutuhan akan kekuasaan yang berkurang menunjukkan keengganan untuk mendominasi dan mungkin mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan bersama. Para pemimpin ini biasanya menunjukkan kepekaan terhadap keadilan, bekerja untuk membangun rasa saling percaya dengan anggota tim, dan merangkul tanggung jawab bersama dalam pendekatan tata kelola mereka.

Indikator keempat yaitu *Need for Affiliation*, menggambarkan keinginan pemimpin untuk menjalin hubungan positif dengan individu atau kelompok lain (Lewoema & Arisanto, 2024). Karakteristik ini mendorong pola keterlibatan yang lebih terbuka dengan entitas eksternal dan sumber informasi. Pemimpin dengan kebutuhan afiliasi yang kuat menghargai hubungan yang harmonis dan cenderung mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap hubungan dengan aktor lain, baik di dalam maupun luar negeri.

Indikator kelima yaitu *Conceptual Complexity*, mencerminkan pendekatan kognitif seorang pemimpin dalam memahami dan merespons situasi (Lewoema & Arisanto, 2024). Pemimpin yang memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi menunjukkan kemampuan yang unggul dalam memahami situasi yang kompleks dan mengembangkan rencana tindakan yang tepat. Mereka menavigasi ambiguitas dengan terampil dan tetap terbuka terhadap dukungan dan masukan dari berbagai sumber (Lewoema & Arisanto, 2024). Proses pengambilan keputusan mereka menggabungkan pertimbangan reaksi internasional dan domestik terhadap tindakan yang diusulkan. Para pemimpin ini melibatkan berbagai aktor dalam pertimbangan mereka dan mendedikasikan waktu yang cukup untuk melakukan analisis yang menyeluruh sebelum mencapai kesimpulan. Sebaliknya, para pemimpin dengan kompleksitas konseptual yang rendah menunjukkan fleksibilitas yang lebih rendah dalam pemikiran mereka, dan sering kali melihat isu-isu melalui klasifikasi biner yang disederhanakan seperti paradigma baik-buruk, hitam-putih, atau teman-musuh (Lewoema & Arisanto, 2024).

Indikator terakhir yaitu *Distrust of Others*, mengukur kecenderungan pemimpin terhadap kecurigaan mengenai tindakan dan niat orang lain. Pemimpin dengan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi mudah mengembangkan kecurigaan tentang motif orang lain, terutama yang dianggap sebagai lawan (Lewoema & Arisanto, 2024). Kecurigaan ini sering kali mengarah pada perspektif zero-sum, di mana situasi dipandang hanya memiliki satu kemungkinan pemenang. Sebaliknya, pemimpin dengan tingkat ketidakpercayaan yang lebih rendah menunjukkan kapasitas yang lebih besar dalam pengambilan perspektif, dengan penilaian kepercayaan mereka yang lebih bergantung pada konteks dan bervariasi sesuai dengan keadaan dan pengalaman masa lalu.

Berdasarkan enam indikator terperinci ini, Hermann mengidentifikasi tiga pertanyaan mendasar yang membantu mengkategorikan gaya kepemimpinan secara lebih luas (Lewoema & Arisanto, 2024): Apakah seorang pemimpin mengikuti batasan-batasan politik?; Apakah pemimpin terbuka terhadap informasi baru?; Apakah pemimpin tersebut lebih berfokus pada masalah atau berfokus pada hubungan?; Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan kerangka kerja yang mudah diakses untuk memahami kecenderungan kepemimpinan tanpa memerlukan analisis terperinci dari keenam indikator secara bersamaan.

Penelitian Hermann mengklasifikasikan para pemimpin ke dalam dua orientasi utama berdasarkan karakteristik yang diungkap melalui keenam indikator di atas. Orientasi pertama, kepemimpinan agresif yaitu mencakup individu yang menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan, kompleksitas konseptual yang rendah, ketidakpercayaan yang signifikan terhadap orang lain, kecenderungan nasionalis yang kuat, dan kepercayaan diri pada kemampuan mereka untuk mengendalikan peristiwa di mana mereka berpartisipasi (Lewoema & Arisanto, 2024). Orientasi kedua, kepemimpinan konsiliasi, menggambarkan para pemimpin yang menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan afiliasi, kompleksitas konseptual yang substansial, kepercayaan terhadap orang lain, kecenderungan nasionalis yang terbatas, dan keyakinan yang minimal terhadap kemampuan pribadi mereka untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa yang melibatkan mereka (Lewoema & Arisanto, 2024). Berdasarkan penjelasan di atas, Vladimir Putin termasuk ke dalam kategori pemimpin yang agresif. Keputusannya untuk menganeksasi Krimea dan

invasi ke Ukraina menjadi bukti konkret bahwa Putin merupakan pemimpin yang membutuhkan pengaruh dan kekuasaan yang kuat.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Pada bagian ini akan diuraikan data penelitian yang diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal, publikasi pemerintah, berita, dan wawancara untuk pendukung analisis peran Vladimir Putin dalam proses sekuritisasi ‘nilai tradisional’ pada invasi Ukraina pada tahun 2021. Sumber-sumber kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk membangun landasan analisis penelitian. Bagian ini terdiri gambaran umum Rusia, Ukraina, dan bagaimana Vladimir Putin melakukan sekuritisasi ‘nilai tradisional’ untuk menjustifikasi invasi ke Ukraina tahun 2021.

Gambaran Umum Rusia

Rusia merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah dengan populasi 145 juta orang pada tahun 2023 (Worldometers, 2024). Negara ini menganut sistem politik otoriter yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin, yang merupakan tokoh sentral dalam politik Rusia sejak tahun 2000 hingga sekarang (Bell, 2024). Nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya terintegrasi pada sistem politik Rusia, kebebasan pendapat masih sangat terbatas. Lembaga advokasi internasional yang berbasis di Amerika Serikat, *Freedom House* mengkategorikan Rusia sebagai negara yang tidak bebas dalam segi hak politik dan kebebasan sipil (Freedom House, 2024). Dari segi perekonomian, Rusia terkenal dengan sistem ekonominya yang dapat bertahan dari sanksi internasional. Pada tahun 2024, Rusia mengalami pertumbuhan PDB sebesar 4,1% setelah 2 tahun invasi ke Ukraina (Wisniewska, 2025). Dari segi kepercayaan, mayoritas penduduk Rusia menganut agama Kristen Ortodoks dengan total 57% dari total populasi (Britannica, 2025).

Sejarah Rusia dari Masa Rus Kiev hingga Uni Soviet

Sejarah Rusia terbagi menjadi empat periode, yaitu Kievan Rus, Kekaisaran, Uni Soviet, dan pasca Uni Soviet (Kanet, 2021). Kievan Rus merupakan sebutan untuk sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa kerajaan suku Slavia. Periode Kievan Rus diawali dengan bersatunya suku-suku Slavia Timur di bawah satu monarki yang dibentuk oleh kepala suku Varangian sekaligus pangeran Viking yang bernama Rurik. Suku Slavia merupakan kelompok yang berasal dari wilayah Eropa Timur yang memiliki budaya dan bahasa yang sama pada masa awal abad ke-5 hingga ke-10. Kejayaan dinasti Rurik terjadi pada masa Pangeran Vladimir Agung yang berhasil mengkonsolidasi seluruh penduduk dinasti untuk menganut kepercayaan Kristen Ortodoks pada tahun 988. Wilayah Kievan Rus mencakup bagian dari negara Belarusia, Ukraina, dan Rusia barat sekarang (Lefebvre, 2022). Masa Kievan Rus terjadi dari tahun 880 hingga kehancurannya pada tahun 1240 akibat invasi dari Kekaisaran Mongol.

Periode Keaisaran Rusia lahir ketika Pangeran Ivan Agung menyatukan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya terbagi oleh Kekaisaran Mongol melalui penaklukan pada tahun 1325 (Kanet, 2021). Pada masa ini, Rusia melahirkan pemimpin-pemimpin ekspansionis yang terkenal seperti Peter yang Agung (Peter the Great) dan Yekaterina yang Agung (Catherine the Great). Puncak kejayaan Kekaisaran Rusia terjadi pada kepemimpinan Alexander III pada tahun

1895 yang melahirkan wilayah cakupan dari Eropa Timur seperti Polandia, Ukraina, Finlandia hingga ke wilayah Asia Utara (Kollmann, 2021). Kekaisaran Rusia berakhir pada revolusi tahun 1917 ketika kelompok Bolshevik merebut kekuasaan dan mengakhiri monarki Kekaisaran Rusia dengan mengeksekusi Kaisar Nicholas II beserta keluarganya. Bolshevik adalah faksi dari Partai Sosial Demokratik Buruh Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin (Ningsih & Nailufar, 2021). Setelah berhasil meruntuhkan monarki terkahir Kekaisaran Rusia, partai ini kemudian berubah nama pada tahun 1918 menjadi Partai Komunis Uni Soviet. Pada rentang tahun 1917 hingga 1923, terjadi perang sipil antara kelompok Bolshevik dengan loyalis Kekaisaran Rusia. Karena popularitas dan banyaknya dukungan dari para pekerja dan petani yang sebelumnya tertindas pada masa Kekaisaran Rusia, perang sipil tersebut dimenangkan oleh kelompok Bolshevik.

Berakhirnya Perang Sipil Rusia tahun 1917-1923 melahirkan empat Republik Soviet yaitu Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Republik Sosialis Soviet Belarusia, dan Republik Sosialis Federatif Soviet Transkaukasia yang mencakup Armenia, Azerbaijan, dan Georgia (Woolley, 2021). Pada tanggal 30 Desember 1922, perwakilan dari republik-republik tersebut menandatangani Perjanjian Pembentukan Uni Republik Sosialis Soviet di Moskow yang secara resmi menggabungkan empat republik menjadi negara federal tunggal dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di Moskow. Negara sosialis ini kemudian dikenal dengan sebutan Uni Soviet.

Pada periode Uni Soviet, terjadi tiga peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Rusia, yaitu Perang Dunia II, Perang Dingin, dan Runtuhnya Uni Soviet (Woolley, 2021). Pada Perang Dunia II, Uni Soviet memainkan peran penting dalam kekalahan Jerman Nazi. Terdapat dua alasan mengapa Uni Soviet menjadi negara yang menjadi aktor penting dalam Perang Dunia II. Pertama, Uni Soviet adalah negara pertama yang menyerang dan memasuki Berlin pada 21 April 1945, yang merupakan ibukota Jerman Nazi. Kedua, Uni Soviet merupakan negara yang paling banyak menanggung korban jiwa selama Perang Dunia II. Dedikasi Uni Soviet untuk mengalahkan Jerman Nazi telah mengorbankan 17 juta tentara dan 26 juta warganya, atau dengan kata lain bahwa 22% penduduk Uni Soviet menjadi korban Perang Dunia II (Medinsky, 2021).

Terdapat implikasi penting dari kemenangan Uni Soviet terhadap Jerman Nazi, yaitu perubahan status dari kekuatan regional (*regional power*) menjadi negara adidaya (*superpower*) (McCauley & Conquest, 2025). Kekalahan Jerman Nazi pada tahun 1945 melahirkan dua kekuatan dominan di panggung internasional, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki perbedaan ideologi yang kontras, yaitu Kapitalisme dan Komunisme. Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi periode Perang Dingin. Istilah Perang Dingin merujuk pada periode ketegangan politik dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selama Perang Dingin, kedua negara saling menghindari terjadinya perang langsung, namun melakukan persaingan dalam segi penyebaran ideologi, ekonomi, teknologi, spionase, dan perang proksi (McCauley & Conquest, 2025). Periode Perang Dingin berlangsung dari tahun 1947 hingga 1991 yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan Uni Soviet runtuh, yang signifikan berdampak adalah lemahnya ekonomi dan korupsi yang mendalam di

Pemerintahan Uni Soviet (McCauley & Conquest, 2025). Periode runtuhnya Uni Soviet terjadi pada kepemimpinan Mikhail Gorbachev yang mengeluarkan kebijakan reformasi politik dan ekonomi di Uni Soviet untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang disebut glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi perekonomian). Secara implisit, dua kebijakan tersebut mengurangi kontrol Pemerintahan Soviet terhadap informasi dan ekonomi (McCauley & Conquest, 2025).

Kebijakan Gorbachev membuat permasalahan dalam sistem politik yang otoriter di dalam Uni Soviet, yaitu melemahkan kontrol pemerintahan pusat terhadap berbagai republik di Uni Soviet (Osborn & Ostroukh, 2021). Keadaan ekonomi yang semakin buruk dan ketidakstabilan politik, menumbuhkan gerakan nasionalisme di negara-negara Baltik, Ukraina, dan Georgia untuk memisahkan diri dari Uni Soviet (McCauley & Conquest, 2025). Pada rentan tahun 1988-1991, terjadi deretan deklarasi kemerdekaan dari Estonia, Georgia, Lithuania, Latvia dan Ukraina. Melihat banyaknya gerakan untuk memisahkan diri, pemerintah Uni Soviet mengeluarkan kebijakan referendum di setiap republik untuk menguatkan kembali legitimasi dan kewenangan pemerintahan sentral.

Uni Soviet mengadakan referendum pada 17 Maret 1991 di Republik Soviet Federatif Sosialis Rusia yang menghasilkan pembentukan jabatan presiden dan wakil presiden dengan melalui pemilihan langsung. Setelah referendum, pemilihan presiden Rusia pertama kali diadakan pada 12 Juni 1991 yang dimenangkan oleh Boris Yeltsin sebagai Presiden Rusia pertama pada 10 Juli 1991. Akibat kehilangan kontrol republik di negara-negara Baltik, kelompok radikal dari Partai Komunis Uni Soviet melakukan kudeta pada 18 Agustus 1991 untuk merebut kekuasaan dari Mikhail Gorbachev karena kebijakannya yang dianggap menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah (McCauley & Conquest, 2025). Namun, kudeta ini gagal karena mendapatkan perlawanan dari gerakan sipil anti otoriter di Moskow. Kegagalan kudeta ini menyebabkan pembubaran Partai Komunis Uni Soviet dan runtuhnya Uni Soviet empat bulan kemudian.

Pada tanggal 8 Desember 1991, Yeltsin bersama para pemimpin Ukraina dan Belarus menandatangani Perjanjian Belovezha, yang menyatakan bahwa Uni Soviet telah dinyatakan bubar. Kemudian, pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Uni Soviet dan mengakui pemerintahan Yeltsin. Pada malam itu, bendera Uni Soviet diturunkan di halaman Gedung Kremlin dan digantikan oleh bendera triwarna Rusia, yang menandai berakhirnya Uni Soviet dan lahirnya negara Federasi Rusia (Woolley, 2021).

Gambaran umum Ukraina

Sejarah Ukraina berawal dari suku Slavia Timur yang tinggal di sekitar Sungai Dnieper yang membentang dari Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Walaupun memiliki kesamaan sejarah dengan Rusia dari periode Rus Kiev, orang Ukraina merupakan keturunan dari suku-suku Slavia Timur yang berpusat di wilayah Kyiv yang memiliki hubungan dengan budaya Polandia dan Lithuania (Kryzhanivsky & Hajda, 2025). Hal ini karena ketika kehancuran Rus Kiev, Ukraina dikuasai oleh Persemakmuran Kerajaan Polandia dan Lituania (*Polish-Lithuanian Commonwealth*) pada abad ke-14. Wilayah Ukraina kemudian tergabung kedalam Kekaisaran Rusia dari tahun 1795 hingga 1917.

Setelah berakhirnya Perang Sipil Rusia, Ukraina berubah menjadi Republik Sosialis Soviet Ukraina pada tahun 1919, yang kemudian bergabung ke Uni Soviet pada tahun 1922 (Kryzhanivsky & Hajda, 2025). Pada 24 Agustus 1991, Parlemen Ukraina Verkhovna Rada mengumumkan Deklarasi Kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet. Referendum dilakukan pada 1 Desember 1991 dengan hasil 90% pemilih setuju Ukraina sebagai negara merdeka. Secara letak geografis, negara Ukraina terletak antara Eropa, Rusia, dan akses ke Mediterania melalui Laut Hitam.

Gambaran Umum Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovich Putin atau sering disebut Vladimir Putin merupakan pemimpin paling berpengaruh di dunia serta Presiden Federasi Rusia yang paling lama menjabat sejak runtuhnya Uni Soviet (Rachman, 2022). Ia lahir di Leningrad (sekarang St. Petersburg) pada 7 Oktober 1952. Sebelum berkarir di politik, Putin menghabiskan 16 tahun umurnya sebagai petugas intelijen luar negeri KGB dengan lokasi penempatan tugas di Dresden, Jerman Timur hingga mendapatkan pangkat letnan kolonel. KGB (*Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti*) yang berarti Komite Keamanan Negara merupakan nama dari badan intelijen Uni Soviet, badan ini bertanggung jawab dalam operasi spionase, pengawasan domestik, dan kontra intelijen.

Karir politik Vladimir Putin dimulai ketika ia bekerja sebagai penasihat Walikota St. Petersburg, yang kemudian naik pangkat menjadi Wakil Walikota pada tahun 1994 (Ray, 2025). Pada tahun 1996 atas keberhasilannya menjalankan birokrasi Kota St. Petersburg secara efisien, Putin direkomendasikan oleh kerabat dekat Presiden Boris Yeltsin yaitu Anatoly Chubais untuk dipekerjakan di Moskow. Pada tahun 1997, Putin diangkat menjadi Wakil Kepala Departemen Pengelolaan Kekayaan Presiden yang bertugas mengawasi proses pemindahan aset dari era Uni Soviet kedalam struktur sistem aset Federasi Rusia.

Putin kembali dipindahkan tugasnya dalam pemerintahan Yeltsin pada tahun 1998 untuk menjabat sebagai direktur Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia (FSB) yang merupakan badan intelijen penerus KGB Uni Soviet. Kekuasaan Yeltsin runtuh di tahun 1999 ketika kondisi kesehatannya memburuk disertai tuntutan pemakzulan dari Majelis Federal Rusia, yang merupakan badan legislatif nasional Federasi Rusia. Akibat situasi yang tidak stabil, Putin diangkat menjadi Perdana Menteri Rusia. Pada 31 Desember 1999, Boris Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden dan menunjuk Vladimir Putin sebagai presiden sementara (Ray, 2025). Putin kemudian resmi dipilih menjadi Presiden Federasi Rusia setelah memenangkan Pemilu Presiden tahun 2000 yang menandai periode awal jabatannya sebagai pemimpin Rusia. Memasuki tahun 2025, Vladimir Putin telah 25 tahun berkuasa.

Pandangan Vladimir Putin Terhadap Ukraina

Bagian ini akan menguraikan apa saja isi yang terkandung pada dua pernyataan publik Vladimir Putin tentang Ukraina, yaitu esai tentang sejarah historis orang Rusia dan Ukraina serta pidato deklarasi invasi ke Ukraina. Pada 12 Juli 2021 kremlin mempublikasikan esai yang dibuat oleh Presiden Vladimir Putin dengan judul *On the Historical Unity of Russians and Ukrainians*, dokumen ini memaparkan secara rinci pandangannya mengenai keterkaitan sejarah yang tidak terpisahkan antara bangsa Rusia dan Ukraina. Pemilihan waktu publikasi yang

tepatnya tujuh bulan sebelum invasi militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 ditafsirkan sebagai bentuk geopolitik Rusia terhadap Ukraina (Düben, 2023).

Inti dari argumen Putin pada esai tersebut berisi tiga klaim historis. Pertama, ia menyatakan bahwa Rusia, Ukraina, dan Belarusia semuanya adalah keturunan orang-orang Rus kuno. Dia menggambarkan Kievan Rus sebagai “negara terbesar di Eropa” pada masa kejayaannya yang diikat oleh bahasa, ekonomi, pemerintahan, dan keyakinan Ortodoks yang sama. Penegasan historis ini merupakan motif yang berulang dalam retorika kebijakan luar negerinya (Chkhaidze, 2024). Putin kemudian menyebut bahwa istilah “Ukraina” itu sendiri secara historis merujuk pada wilayah perbatasan, sehingga penduduk di wilayah-wilayah tersebut diidentifikasi sebagai orang Rusia dan Ortodoks.

Kedua, Putin menekankan ikatan keagamaan yang dibangun oleh Santo Vladimir dan adopsi kepercayaan Ortodoks. Vladimir merupakan Pangeran Novgorod dan Pangeran Agung Kiev yang mengubah Kievan Rus menjadi Kristen Ortodoks pada tahun 988 Masehi (Windhausen, 2022). Peristiwa ini menurut Putin, “masih sangat menentukan kedekatan kami hari ini” dan menjadi bukti bahwa Rusia dan Ukraina telah lama hidup di bawah pemerintahan spiritual dan politik yang sama. Ia menyebut orang-orang Ukraina sebagai “saudara dalam iman”, menggarisbawahi ruang spiritual yang sama.

Ketiga, Ukraina modern sepenuhnya merupakan produk era Soviet, yang sebagian besar dibentuk di atas tanah Rusia yang bersejarah. Dia menegaskan bahwa Ukraina modern sepenuhnya diciptakan oleh Rusia atau lebih tepatnya, oleh Bolshevik, Komunis Rusia. Putin mengkritik para pemimpin Soviet terutama Vladimir Lenin, atas kebijakan yang diduga memisahkan tanah historis Rusia dan memasukkannya ke dalam Republik Sosialis Soviet Ukraina. Untuk memperkuat argumennya, Putin menyarankan untuk membandingkan batas-batas wilayah Rusia pada abad ke-17 dengan wilayah Republik Sosialis Soviet Ukraina saat meninggalkan Uni Soviet. Argumen ini bertujuan untuk mendelegitimasi perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional.

Putin juga menguraikan beberapa tuduhan terhadap pengaruh Barat di Ukraina, yaitu terdapat koneksi antara kelompok nasionalis radikal dan neo-Nazis dengan Barat, Amerika Serikat dan Uni Eropa secara sistematis mendorong Ukraina untuk membatasi kerjasama ekonomi dengan Rusia, Barat secara sengaja melibatkan Ukraina terlibat dalam permainan geopolitik antara Eropa dan Rusia, negara-negara Barat secara langsung mempengaruhi politik dalam negeri Ukraina, kekuatan barat tidak ingin adanya perdamaian antara pemerintah Ukraina dengan kelompok masyarakat yang pro-Rusia di Donbas, dan yang terakhir Putin menuduh Barat sebagai aktor utama pembuat proyek anti-Russia di dalam sistem politik Ukraina. Menurutnya, inilah yang menyebabkan setiap presiden, anggota parlemen dan menteri Ukraina akan terus memiliki pandangan yang negatif terhadap Rusia. Referensi Putin yang konsisten terhadap akar sejarah di era Kievan Rus dan kepercayaan Ortodoks yang sama sebagai bukti utama kesamaan Rusia-Ukraina, membentuk sebuah narasi determinisme historis. Hal ini berimplikasi bahwa menurut pandangan Putin, realita Ukraina di era politik modern termasuk kemerdekaan Ukraina dan identitas nasionalnya, dibingkai sebagai penyimpangan dari jalur yang telah ditentukan secara historis. Hal ini menjadi salah satu alasan Vladimir Putin melakukan invasi ke Ukraina.

Sumber pernyataan kedua yang akan dibahas adalah pidato Vladimir Putin pada tahun 2022 tentang deklarasi invasi ke Ukraina, pada situs pemerintahan Rusia yaitu Kremlin, pidato ini diberi judul *Address by the President of the Russian Federation*. Terdapat empat topik utama yang diangkat pada pidato ini. Pertama, ekspansi NATO dari segi infrastruktur militer dan pengaruhnya telah semakin mendekati perbatasan Rusia sebagai ancaman. Putin menambahkan bahwa Amerika Serikat dan Eropa merupakan ‘empire of lies’ karena selama 30 Tahun setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mencoba untuk menempuh kesepakatan dengan negara-negara NATO mengenai keamanan yang setara dan adil di Eropa. Namun, menurut Putin upaya ini tidak dianggap serius oleh Barat karena realita ekspansi keanggotaan NATO yang terus mendekati perbatasan Rusia. Pada bulan Desember tahun 2021, kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai keamanan Eropa dan non-ekspansi NATO dinilai sia-sia karena Amerika Serikat tidak mengubah posisinya untuk mendukung ekspansi dan mengabaikan kepentingan Rusia.

Topik kedua membahas sejarah intervensi militer yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Menurut Putin, perang yang terjadi di Serbia, Irak, Libya, Irak, dan Afghanistan sebagai contoh kurang kuatnya hukum internasional terhadap negara adidaya seperti Amerika Serikat. Ketiga, Putin membahas Ukraina yang ia anggap telah menjadi tempat berkembangnya kelompok nasionalis radikal dan neo-Nazi yang membenci masyarakat Ukraina pro-Rusia yang tinggal di wilayah Ukraina Timur yaitu Donbass dan Luhanks. Ia juga mengklaim Amerika Serikat dan NATO telah mengubah Ukraina menjadi negara yang ia sebut ‘anti-Rusia’, sehingga untuk melindungi orang-orang Donbass dan Luhanks, Putin mengumumkan invasi ke Ukraina yang ia sebut ‘operasi militer khusus’. Menurut Fisher (2022) pidato ini menggambarkan bahwa Putin telah menganggap jalan diplomasi gagal, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan krisis eksistensial yang dihadapi Rusia melalui jalur militer.

Gagasan Putin tentang Nilai Tradisional Rusia

Pada wacana politik Rusia kontemporer, penggunaan konsep ‘nilai tradisional telah berkembang menjadi sebuah pilar ideologi dan pembentuk kebijakan luar negeri Rusia terhadap negara-negara Barat (Beehner, 2022). Retorika ‘nilai tradisional’ mulai menguat pada awal masa jabatan ketiga Vladimir Putin (2012-2018), pejabat negara dan perwakilan Gereja Ortodoks Rusia (ROC) menggunakannya untuk membangun reputasi Rusia sebagai pembela nilai-nilai agama Kristen yang bertentangan dengan nilai-nilai liberal Barat. Di media Rusia dan pidato-pidato para pejabat, ‘nilai tradisional’ digunakan untuk menentang kebijakan Eropa tentang kesetaraan gender dan hubungan sesama jenis (Davidenko & Utkina, 2024).

Pada 28 Juni 2019, Vladimir Putin menjelaskan pendapatnya tentang nilai tradisional dan liberal dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Financial Times. Menurut Putin, nilai-nilai liberal mulai ditolak oleh mayoritas orang di Amerika Serikat karena sudah usang. Ia menambahkan bahwa nilai-nilai tradisional lebih stabil dan penting bagi jutaan orang dibandingkan nilai liberal. Pada wawancara ini juga Putin mengemukakan beberapa hasil kebijakan dari nilai liberal yang menurutnya bermasalah yaitu migrasi, keragaman gender dan multikulturalisme (Rahn, 2019). Pada tahun 2024, Vladimir Putin kembali

mengeluarkan pernyataan publik tentang pentingnya menjaga ‘nilai tradisional’, yang pertama pada pidato World Year of the Family Rusia 2024, ia menyatakan bahwa banyak negara-negara yang mengancurkan konsep keluarga dan digantikan oleh gaya hidup yang merusak, berbeda dengan Rusia yang akan melestarikan nilai-nilai tradisional dan keluarga kepada generasi berikutnya (TASS, 2024).

Kemudian pada pertemuan di Kremlin pada 5 Agustus 2024, Putin menyerukan kepada para pejabat untuk mengembangkan program yang mempromosikan nilai-nilai spiritual dan moral tradisional Rusia (Associated Press, 2024). Vladimir Putin sempat merincikan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam konsep nilai tradisionalnya pada World Youth Festival Rusia 2024 yaitu kesetaraan, keadilan, tradisi keluarga yang kuat, saling membantu, dan tanggung jawab terhadap Tanah Air sebagai elemen inti (TASS, 2024).

Ancaman Barat di Ukraina Menurut Putin

Terdapat tiga kategori yang menjelaskan alasan Rusia takut kehilangan pengaruhnya di Ukraina, yaitu ideologi, geopolitik, dan ekonomi. Menurut Myerson (2023) salah satu faktor paling signifikan yang mendorong ketakutan Rusia adalah *democratic contagion* yaitu kekhawatiran bahwa demokrasi di Ukraina dapat menginspirasi gerakan serupa di dalam negeri Rusia sendiri, ia menambahkan untuk mencegah rakyat Rusia melihat demokrasi yang sukses di salah satu negara Slavia tetangganya, Presiden Vladimir Putin selalu memiliki kepentingan untuk meruntuhkan demokrasi dan menindas kemerdekaan politik Ukraina.

Aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 merupakan perwujudan dari ketakutan tersebut. Setelah terjadi dua revolusi besar yaitu *Orange Revolution* dan Revolusi *Maidan* di Ukraina yang menghasilkan pemerintahan Ukraina pro demokrasi, kebijakan luar negeri Rusia menjadi lebih koersif hingga menimbulkan perang sipil di Ukraina Timur (Myerson, 2023). Faktor kenapa Putin sangat takut dengan gerakan demokrasi berakar dari bentuk politik domestik dan pemerintahan yang otoriter. Menurut Masters (2023) faktor pendorong terpenting bagi Putin adalah ketakutannya bahwa Ukraina akan terus berkembang menjadi negara demokrasi modern model Barat yang pasti akan meruntuhkan rezim otokratiknya di Rusia.

Dari segi geopolitik, kekhawatiran Rusia akan kehilangan pengaruhnya di Ukraina sangat berkaitan dengan faktor geopolitik mengenai ekspansi NATO dan pengaruh Barat di wilayah bekas Uni Soviet. Putin telah menyatakan aktivitas NATO di Ukraina dan pertumbuhan kemampuan militer Ukraina sebagai ancaman bagi keamanan Rusia yang disebutnya sebagai “garis merah” (Rumer & Weiss, 2021). Hasil studi The Council on Foreign Relations menggarisbawahi bahwa dari sudut pandang Rusia, konflik ini lebih dari sekadar perselisihan bilateral dengan Ukraina, namun merupakan krisis keamanan Eropa (Masters, 2023). Perspektif geopolitik ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Rusia tentang kemerdekaan Ukraina tidak dapat dipisahkan dari kekhawatiran tentang tatanan Eropa pasca-Perang Dingin secara keseluruhan. Rusia memandang keberpihakan Ukraina kepada institusi-institusi Barat sebagai bagian dari pola yang lebih besar dari campur tangan Barat terhadap apa yang Moskow anggap sebagai wilayah pengaruhnya.

Pada segi ekonomi, Rusia dan Ukraina memiliki kerjasama ekonomi pada sektor energi. Bagi Rusia, Ukraina merupakan rute transit penting untuk melakukan ekspor energinya ke Eropa. Pada tahun 2020, Rusia masih menjadi salah satu mitra dagang utama Ukraina meskipun ada ketegangan setelah aneksasi Krimea pada tahun 2014. Menurut basis data WITS Bank Dunia, pada tahun 2020 Rusia berada di peringkat ketiga sebagai tujuan ekspor dan sumber impor terbesar Ukraina (World Bank, 2020). Perdagangan bilateral selama periode ini didominasi oleh energi dan *raw material*. Ukraina bergantung pada impor gas alam Rusia, sementara Rusia bergantung pada infrastruktur transit Ukraina untuk memasok pasar Eropa. Ekspor pertanian terutama gandum dan minyak bunga matahari juga merupakan komponen penting dalam perdagangan antara Rusia dan Ukraina, yang secara kolektif menyumbang 28,9% dari ekspor gandum global dan 60% dari produksi minyak bunga matahari (World Bank, 2020). Berkurangnya pengaruh di Ukraina berimplikasi kehilangan pendapatan ekonomi yang signifikan bagi Rusia. Selama perang Rusia dan Ukraina berlangsung dari kurun 2022-20224, Rusia mengalami kerugian sebesar 59,8 milyar Dollar AS (Kotov, 2022).

Sekuritisasi Nilai Tradisional Untuk Menjustifikasi Invasi Ukraina

Proses sekuritisasi dimulai dari kategori pertama yaitu *non-political*. Pada kategori ini suatu isu masih menjadi subjek diskusi publik dan belum mencapai tingkat pemerintahan (Pradnyana, 2023). Pada penelitian ini, yang termasuk kategori *non-political* adalah pernyataan yang tidak memiliki tujuan dan implikasi langsung terhadap upaya sekuritisasi ‘nilai tradisional’ untuk menjustifikasi invasi ke Ukraina. Namun, hal ini bisa mempengaruhi persepsi publik terutama masyarakat Rusia agar diperlukannya upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisional.

Kategori kedua adalah *political process*, yaitu ketika isu sudah memasuki ranah diskusi para pemangku kebijakan di pemerintahan (Pradnyana, 2023). Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah mendapatkan simpati dan perhatian publik tentang ancaman terhadap ‘nilai tradisional’ yang di akibatkan oleh pengaruh barat ke Ukraina. Pada kategori ini belum ada pernyataan langsung perlunya pendekatan sekuritisasi, namun isu dikemukakan untuk meningkatkan tingkat keseriusan untuk mendapatkan justifikasi dari publik.

Pada kategori ketiga merupakan proses sekuritisasi, yaitu ketika aktor sekuritisasi telah memutuskan untuk memasukan isu kedalam kategori ancaman dan perlunya kebijakan atau upaya untuk menghadapinya (Pradnyana, 2023). Dalam kategori ini, pernyataan dikemukakan oleh aktor sekuritisasi dam langsung menghasilkan kebijakan sekuritisasi di tingkat negara yang pada konteks penelitian ini merupakan sebuah deklarasi perang. Untuk memudahkan penjabaran beberapa pernyataan dari aktor sekuritisasi, berikut tabel kodifikasi proses sekuritisasi ‘nilai tradisional’ yang berisi pernyataan-pernyataan Vladimir Putin dalam berbagai wawancara dan tulisan. Model tabel dibawah ini diambil dari penelitian Pradnyana (2023).

	Waktu	Isi Pernyataan	Pembuat Pernyataan	Sumber
--	--------------	-----------------------	---------------------------	---------------

<i>non-political</i>	2013	Banyak negara-negara yang merubah nilai moral, etika, dan moral. Rusia merupakan pelindung konservatisme dan nilai tradisional.	Vladimir Putin	Kremlin
<i>Political-Prosses</i>	2014	Krimea merupakan wilayah yang memiliki sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan yang menyatukan Rusia, Ukraina, dan Belarus	Vladimir Putin	Kremlin
	2019	Nilai-nilai tradisional lebih stabil dan lebih penting bagi jutaan orang dibandingkan dengan ide liberal ini, yang menurut pendapat saya, sudah tidak ada lagi.	Vladimir Putin	DW
	2021	Tembok yang muncul dalam beberapa tahun terakhir antara Rusia dan Ukraina, antara bagian-bagian yang pada hakikatnya merupakan ruang sejarah dan spiritual yang sama, menurut saya adalah kemalangan dan tragedi besar yang kita alami bersama.	Vladimir Putin	Kremlin
Sekuritisasi	2022	Mereka berusaha menghancurkan nilai-nilai tradisional kita dan memaksakan nilai-nilai palsu mereka yang akan menggerogoti kita, rakyat kita dari dalam, sikap-sikap yang telah mereka paksakan secara agresif di	Vladimir Putin	Kremlin

		<p>negara mereka, sikap-sikap yang secara langsung mengarah pada degradasi dan degenerasi, karena bertentangan dengan kodrat manusia. Ini tidak akan terjadi. Tidak seorang pun pernah berhasil melakukan ini, dan mereka juga tidak akan berhasil sekarang.</p>		
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Kodifikasi Proses Sekuritisasi Nilai Tradisional

Tabel diatas menunjukkan bahwa awal penggunaan konsep ‘nilai tradisional’ oleh Vladimir Putin bertujuan untuk menunjukkan dua perbedaan normatif antara budaya Barat dan Rusia. Pertama, Putin membingkai Rusia sebagai negara yang lebih unggul dari negara negara barat yang mengalami transformasi negatif dari nilai-nilai moral dan etika. Kedua, Rusia memposisikan sebagai negara pelindung tradisi konservatif yang menjaga nilai-nilai tradisional dari pengaruh budaya liberal Barat yang menurutnya bersifat destruktif. Menurut Pieszak (2025) konservatisme di Rusia digunakan oleh Putin untuk mempertahankan rezim otoriternya dan sebagai gagasan ideologis yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia seperti di Ukraina dan Suriah.

Pada kategori *political process*, Putin mulai menghubungkan konsep nilai tradisional dan nilai kemanusiaan dengan sejarah sebagai elemen pemersatu bagi Rusia, Ukraina, dan Belarus untuk menjustifikasi aneksasi Krimea pada tahun 2014. Dalam pernyataan tahun 2019, konsep ‘nilai tradisional’ dibandingkan secara gamblang dengan gagasan liberal yang memperkuat adanya konflik ideologi antara Rusia dengan Barat. Terakhir, pada pernyataan esai nya Putin mencoba untuk melegitimasi bahwa Rusia dan Ukraina seharusnya bersatu. Menurut (Beehner, 2022) hal tersebut merupakan dasar klaim intervensionis Putin yang menganggap bahwa kemerdekaan Ukraina tidak mempunyai dasar legitimasi dan lebih merugikan kedua negara.

Pernyataan-pernyataan ini secara kolektif menunjukkan meningkatnya politisasi ‘nilai tradisional’ yang tidak lagi sekadar prinsip abstrak, tetapi berkembang sebagai alat untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa geopolitik dan menggambarkan perbedaan Rusia dengan Barat dari aspek ideologi dan budaya. Hal ini sejalan dengan konsep ‘Ruskii Mir’ (Dunia Rusia) yang pernah di analisis oleh Sam Appels (2024) dalam tesis nya yang berjudul *Russkiy Mir Discourse: A Comparative Analysis of Ukraine and Kazakhstan*. Menurutnya, konsep ‘Ruskii Mir’ merupakan cita-cita Vladimir Putin untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki sejarah, bahasa, dan kepercayaan yang sama sebagai pengikat Ukraina dan Belarus dengan Rusia (Appels, 2024).

Pada tahap sekuritisasi, 'nilai tradisional' dibingkai secara tegas sebagai objek rujukan (*referent object*) yang terancam secara eksistensial. Ancaman tersebut sebagai "nilai-nilai palsu" yang secara implisit merupakan norma-norma liberal Barat. Putin menganggap bahwa norma barat bukan hanya sebagai ideologi yang berbeda, tetapi sebagai alat untuk memusuhi dan merusak Rusia. Pemilihan kata seperti "menghancurkan", "mengikis", "merendahkan", "degenerasi", dan "bertentangan dengan kodrat manusia", bertujuan untuk membentuk persepsi dan meyakinkan kepada target (*audience*) yaitu para pemangku kebijakan di Barat serta Rusia, Masyarakat Rusia dan Ukraina, serta Masyarakat Internasional bahwa norma-norma liberal Barat sudah menjadi ancaman keamanan eksistensial bagi Rusia. Hal inilah yang kemudian mengarahkan Putin untuk melakukan invasi ke Ukraina dibawah nama 'operasi militer khusus'.

Results

Rasionalitas Kebijakan Untuk Menginvasi Ukraina

Menurut Graham Allison, dibutuhkan empat langkah untuk membuat keputusan rasional, yaitu identifikasi masalah, menentukan hasil yang diinginkan, mengevaluasi konsekuensi, dan membuat keputusan yang memaksimalkan keuntungan (Elvira, 2021). Berdasarkan teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Graham Allison, tindakan Vladimir Putin untuk menginvasi Ukraina dapat dijelaskan dengan Model Aktor Rasional (*Rational Actor Model*). Hal ini karena Putin merupakan pemimpin yang paling dominan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia (Gotz & Mcfaul, 2021).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Vladimir Putin dari tahun 2013 hingga 2022, diketahui bahwa Rusia memiliki tiga permasalahan besar. Pertama, ekspansi keanggotaan NATO yang terus mendekati perbatasan wilayah Rusia di bagian Eropa Timur. Implikasi dari ekspansi NATO adalah Rusia akan terisolasinya dari dunia luar karena jika NATO berhasil memegang kekuasaan geopolitik penuh di Eropa Timur, maka Rusia akan semakin lemah (Rohman, Napang, & Nurhasanah, 2021).

Posisi geopolitik dan konfrontasi Rusia dengan NATO telah disampaikan oleh Vladimir Putin dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Munich ke-43 pada tanggal 10 Februari 2008 (Fried & Volker, 2022). Terdapat lima aspek yang dibahas oleh Putin dalam pidato tersebut. Pertama, dominasi Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dingin telah menciptakan tatanan dunia yang unipolar. Menurutnya hal ini berimplikasi bahwa sistem internasional memiliki satu pusat kekuatan dan pengambilan keputusan. Kedua, Ekspansi NATO ke Timur merupakan tindakan provokasi yang bisa menghasilkan krisis keamanan yang serius di Eropa. Putin mempertanyakan tujuan perluasan NATO dan menyoroti bahwa hal ini bertentangan dengan jaminan yang diberikan kepada Rusia setelah pembubaran Pakta Warsawa, yang menyatakan NATO tidak akan bergerak ke arah timur. Kemudian ia menambahkan kutipan dari pernyataan mantan Sekretaris Jenderal NATO Manfred Wörner di tahun 1990 bahwa NATO tidak akan menempatkan pasukan di luar Jerman sebagai jaminan keamanan bagi Uni Soviet. Hal ini menurut Putin merupakan kebohongan belaka karena ekspansi NATO yang terus berjalan (Fried & Volker, 2022). Aspek ketiga yang dibahas adalah perlombaan senjata (*arms race*) yang bisa terjadi akibat pembangunan infrastruktur militer NATO yang semakin dekan dengan perbatasan Rusia. Keempat, Putin juga

mengkritik kecenderungan intervensi militer yang dilakukan oleh NATO dan Uni Eropa yang mengabaikan aturan PBB, menurutnya hal ini merupakan tindakan yang sepihak. Terakhir, Vladimir Putin mengumumkan perubahan kebijakan geopolitik Rusia menjadi lebih defensif dan independen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Permasalahan kedua yang dihadapi Rusia dibawah kepemimpinan Putin adalah hubungan dengan Ukraina yang semakin memburuk. Retaknya hubungan Rusia dan Ukraina ditandai dengan penolakan masyarakat Ukraina dengan pemerintahan yang pro-Rusia, seperti gerakan sipil *Orange Revolution* pada tahun 2004-2005 dan *Euromaidan* 2013-2014. Dari kedua gerakan sipil tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk merubah Ukraina menjadi negara yang bebas dari pengaruh Rusia. Aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 memperparah keadaan hubungan kedua negara, setelah peristiwa tersebut Ukraina membatalkan 124 perjanjian bilateral yang mencakup keamanan dan militer (Uvarov, 2023). Ukraina juga melakukan sanksi politik dan ekonomi terhadap aktor-aktor yang terlibat di dalam operasi aneksasi Krimea, serta melakukan boikot produk Rusia (Uvarov, 2023). Sejak aneksasi Krimea, Ukraina berkomitmen untuk mendorong integrasi negaranya ke Uni Eropa di setiap pergantian pemerintahan (Uvarov, 2023). Dari aspek geopolitik dan keamanan, Ukraina berada di antara Rusia dan Eropa yang menjadikannya wilayah penyangga atau *buffer zone* penting bagi Rusia jika negara-negara barat melakukan penyerangan. Hal inilah yang membuat masuknya Ukraina ke NATO merupakan garis merah (*red line*) bagi Rusia (Masters, 2023). Memburuknya hubungan dengan Ukraina dapat meningkatkan peluang bergabungnya Ukraina ke NATO yang akan secara efektif mengisolasi Rusia dari Eropa.

Permasalahan ketiga adalah penyebaran ideologi liberal di Ukraina yang menurut Putin merupakan alat untuk menghancurkan nilai-nilai tradisional Rusia dari dalam. Konsistensi pernyataan Putin tentang penolakan liberalisme sejak tahun 2013 hingga 2021 pada deklarasi invasi ke Ukraina. Menunjukkan keseriusan Putin untuk membingkai nilai-nilai liberal sebagai ancaman eksistensial dan menjaga nilai-nilai tradisional Rusia. Karena kedekatan bahasa dan budaya antara orang Rusia dan Ukraina, gerakan liberal dan demokrasi dapat menginspirasi masyarakat Rusia terutama kaum muda untuk menuntut perubahan rezim yang otriter (Person & McFaul, 2022). Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan, Rusia memilih untuk menyelesaikannya dengan melakukan invasi ke Ukraina pada tahun 2021. Rasionalitas kebijakan ini dapat dilihat setelah menguraikan dan menganalisis apa saja konsekuensi dan keuntungan yang didapatkan oleh Rusia jika tidak memilih untuk melakukan invasi dan melancarkan invasi ke Ukraina.

Jika Rusia tidak membuat keputusan melakukan invasi ke Ukraina, maka akan mendapatkan beberapa konsekuensi. Pertama, Ukraina akan semakin dekat dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO. Hal ini karena masyarakat Ukraina sejak lama ingin bebas dari pengaruh Rusia dari aspek politik domestik maupun internasional dan ekonomi. Sebelum terjadinya aneksasi Krimea, kondisi politik di Ukraina dipenuhi oleh ketidakstabilan seperti demonstrasi dan korupsi akibat kepemimpinan Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Rusia. Berdasarkan investigasi dari jurnalis independen dan pejabat Ukraina, Yanukovich dan orang-orang terdekatnya telah menggelapkan sekitar 10 hingga 30 miliar Dollar AS dari

Ukraina selama masa jabatan kepresidenannya (Doig, 2023). Alasan untuk segera melakukan integrasi ke Uni Eropa bagi Ukraina adalah kebijakan luar negeri Rusia yang koersif atau bersifat memaksa dan tidak menghormati kedaulatan wilayah Ukraina, hal ini terbukti ketika Rusia secara sewenang-wenang melakukan aneksasi Krimea pada tahun 2014.

Konsekuensi kedua adalah semakin bertambahnya anggota NATO dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ancaman dan peringatan Rusia tentang batasan ekspansi NATO akan dianggap pernyataan semata. Akan timbul perspektif dari negara-negara seperti Ukraina yang ingin bergabung ke NATO, bahwa Rusia tidak akan memberikan reaksi secara militer karena ketika pada tahun 2004 sebanyak 3 negara eks-Uni Soviet bergabung ke NATO tanpa ada perlawanan secara militer dari Rusia yaitu, Estonia, Latvia, Lithuania.

Keuntungan yang didapatkan jika tidak melakukan invasi adalah tidak adanya sanksi yang mengganggu ekonomi Rusia. Sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa sejak perang Ukraina dimulai, telah merugikan Rusia sekitar 7-10% dari pertumbuhan PDB di tahun 2022 (BBC, 2024). Sebelum terjadinya perang, Rusia dan Jerman telah menjalin kerjasama energi pada bidang jual beli gas alam dengan total pendapatan sebesar 80 miliar dollar AS per tahun (BBC, 2024). Keberhasilan kerjasama dengan Jerman dapat ditafsirkan bahwa Rusia memiliki jalur untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan Eropa melalui Jerman, serta mendapatkan keuntungan besar. Hal ini karena negara-negara Eropa Barat tidak memiliki cadangan gas alam yang cukup untuk kebutuhan bahan bakar industri dan rumah tangga mereka (Tempo, 2022). Berdasarkan publikasi statistik pasokan gas alam Eropa, pada tahun 2023 tingkat ketergantungan impor gas alam Uni Eropa setelah pemutusan kerja sama dengan Rusia telah mencapai 90% (Eurostat, 2024).

Tidak Melakukan Invasi ke Ukraina	
Konsekuensi	Keuntungan
Ukraina akan semakin dekat dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO. Bertambahnya keanggotaan NATO (Timbul perspektif bahwa Rusia tidak akan melakukan perlawanan).	Tidak adanya sanksi yang mengganggu ekonomi. Hubungan yang lebih dekat dengan Eropa.

Tabel 1.2 Konsekuensi dan Keuntungan Tidak Melakukan Invasi ke Ukraina

Hasil yang diinginkan oleh Rusia pada kebijakan invasi ini tentu saja ingin memenangkan perang dan menundukan Ukraina agar mau menuruti tuntutan dari Rusia. Secara lebih detail terdapat enam tuntutan dari Rusia terhadap Ukraina, yaitu larangan keanggotaan NATO dan kehadiran militer asing, pengakuan kontrol Rusia atas Krimea dan wilayah Timur Ukraina, demiliterisasi Ukraina, pembubaran kelompok nasionalis dan neo-Nazi, status netralitas, dan pencabutan sanksi (Fratsyvir, 2025). Terdapat berbagai konsekuensi selain sanksi yang didapatkan Rusia sejak invasi dimulai. Pertama, yaitu status sebagai negara agresor yang menyebabkan pembatalan kerjasama dari sektor ekonomi, swasta, akademik, dan diplomatik. Biaya Perang Ukraina bagi Rusia telah mengabdikan sebesar 132 miliar

dollar AS dan ditambah dengan kerugian PDB sebesar 104 miliar dollar AS di tahun 2022 akibat sanksi (Shatz & Reach, 2023).

Berdasarkan data dari Kyiv School of Economics, 12% perusahaan internasional yang beroperasi di Rusia sebelum perang telah keluar dan 32,8% telah mengumumkan untuk menghentikan produksi dan operasional (KSE Institute, 2025). Perang ini juga mengakibatkan penghentian dan pemutusan kerjasama akademik dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan negara Uni Eropa lainnya (Chankseliani & Belkina, 2024). Konsekuensi kedua adalah korban jiwa, data dari BBC menunjukkan pada bulan Mei 2025 perang ini telah memakan 700.000 korban jiwa dari militer (Ivshina, 2025).

Dibalik semua konsekuensi itu, Rusia mendapatkan keuntungan-keuntungan yang signifikan dari kebijakan invasi ini. Pertama, karena situasi dan status Ukraina dalam keadaan perang, maka Ukraina tidak bisa menjadi anggota NATO. Berdasarkan artikel yang dipublikasikan situs resmi NATO pada 17 Februari 2025 dengan judul *NATO's response to Russia's invasion of Ukraine*, alasan NATO tidak mengirimkan bantuan berupa perajurit dan pesawat jet tempur untuk membantu Ukraina karena NATO merupakan aliansi defensif yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik, bukan yang memulainya. Artikel tersebut juga menyatakan bahwa mengerahkan pasukan tempur ke Ukraina akan membawa NATO terlibat langsung ke dalam konflik dengan Rusia (NATO, 2025). Pernyataan ini bisa diartikan bahwa NATO menghindari perang terbuka dengan Rusia.

Keuntungan kedua yang didapatkan dari perang ini adalah kontrol atas teritorial yang memiliki kekayaan sumber daya alam terutama mineral. Pada 23 Februari 2025 Menteri Ekonomi Ukraina mengumumkan bahwa wilayah Ukraina yang diduduki Rusia mengandung cadangan mineral bumi yang bernilai 350 miliar dollar AS (Culverwell & Denisova, 2025). Kontrol atas sumber daya ini tidak hanya melemahkan ekonomi dan kemampuan ekspor Ukraina, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi dan strategis Rusia sendiri di meja perundingan (Culverwell & Denisova, 2025). Keuntungan ketiga adalah melegitimasi status Rusia sebagai negara adidaya. Semenjak Perang Ukraina dimulai, Amerika Serikat dan sekutunya hanya bisa memberikan respon koersif yang berupa sanksi ekonomi, pemutusan kerjasama, dan memberikan bantuan suplai persenjataan ke Ukraina. Organisasi Internasional seperti PBB dan Uni Eropa, tidak berhasil menghentikan Rusia untuk melakukan invasi ke Ukraina. Menurut artikelnya yang dipublikasikan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) dengan judul *Russia's Shadow War Against the West*, para pemimpin negara-negara Barat enggan menyerukan respons militer untuk mencegah risiko konflik besar yang berpotensi menimbulkan perang nuklir (Jones, 2025). Keuntungan terakhir adalah stabilitas rezim dan dukungan domestik yang kuat. Perang ini telah memperkuat posisi Vladimir Putin di politik domestik untuk mengonsolidasikan kekuasaan, menekan perbedaan pendapat, dan menumbukan nasionalisme di Rusia (Hill, 2025).

Melakukan Invasi ke Ukraina	
Konsekuensi	Konsekuensi
Biaya perang telah memakan 132 miliar dollar AS.	Ukraina tidak bisa menjadi anggota NATO.

<p>Sanksi ekonomi yang merugikan Rusia 104 miliar dollar AS di tahun 2022. Pembatalan kerjasama dari sektor ekonomi, swasta, akademik, dan diplomatik dari negara-negara maju. Korban jiwa.</p>	<p>Kontrol atas teritorial yang memiliki kekayaan sumber daya alam mineral dengan nilai 350 miliar dollar AS. Melegitimasi status Rusia sebagai negara adidaya</p>
---	--

Berdasarkan uraian diatas, seorang aktor rasional seperti Putin melihat keuntungan strategis secara geopolitik lebih penting daripada konsekuensi yang didapatkan. Ancaman dari barat seperti ekspansi NATO, berkembangnya gerakan demokrasi, penyebaran ideologi dan kebudayaan barat, serta keanggotaan NATO di Ukraina dinilai telah manjedai ancaman yang mendesak dan serius sehingga tindakan untuk menetralsisir ancaman tersebut dianggap rasional bagi Vladimir Putin. Penggunaan konsep ‘nilai tradisional’ dalam pidato tahun 2021 menguatkan pengaruh ideologi konservatisme yang dianut oleh Putin dalam kebijakan luar negeri Rusia, khususnya dalam Perang Ukraina.

Hasil dari analisis konsekuensi dan keuntungan yang didapatkan jika Rusia tidak melakukan invasi ke Ukraina dapat diartikan bahwa Ukraina akan menjadi negara dengan keanggotaan NATO yang menganut ideologi liberal Barat. Jika hal ini terjadi maka Rusia akan terisolasi secara efektif pada aspek geopolitik dan ancaman terhadap rezim otoriter Vladimir Putin. Alasan Putin menggunakan konsep ‘nilai tradisional’ dalam pidato deklarasi perangnya sebagai alasan untuk menjustifikasi, bertujuan untuk meyakinkan dan membentuk persepsi publik bahwa invasi ini merupakan upaya untuk melindungi Rusia dan beberapa wilayah di Ukraina Timur dari nilai-nilai liberal yang Putin anggap sangat merusak.

Konstruktivisme berpendapat bahwa realitas dunia tidak bersifat obyektif, melainkan dikonstruksi secara sistematis melalui praktik-praktik sosial manusia (McCourt , 2022). Perluasan NATO dan demokrasi di Ukraina dianggap sebagai ancaman bagi Rusia terbentuk oleh faktor sejarah seperti runtuhnya Uni Soviet, bergabungnya negara-negara bekas soviet ke NATO, intervensi militer Amerika Serikat dan sekutunya yang mengabaikan hukum internasional, dan gerakan demokrasi di Ukraina yang muncul sejak tahun 2004. Faktor-faktor tersebut membangun interpretasi Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin untuk melakukan tindakan terhadap ancaman eksistensial yang terlihat, sehingga sangatlah rasional bagi Putin untuk melakukan invasi ke Ukraina.

Konstruktivisme menolak asumsi bahwa negara memiliki kepentingan yang tetap dan tidak berubah. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa apa yang diinginkan oleh negara dan bagaimana mereka mendefinisikan kepentingan mereka bergantung pada siapa mereka memahami diri mereka sendiri atau bisa disebut identitas (McCourt , 2022). Putin telah menyatakan berkali-kali khususnya pada wawancara oleh Financial Times tahun 2019 bahwa konservatisme dan ‘nilai tradisional’ merupakan ideologi yang dianut dan dipertahankan oleh Rusia, sehingga penggunaan konsep ‘nilai tradisional’ untuk menjustifikasi invasi ke Ukraina merupakan tindakan untuk mempertahankan identitas Rusia.

Analisis Idiosinkratik Vladimir Putin

Berdasarkan berbagai uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pada bagian ini akan menganalisis atribut pribadi Vladimir Putin yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia.

a. Nationalism

Nasionalisme sangat mempengaruhi pandangan Vladimir Putin terhadap dunia. Ideologi nasionalisme Putin dapat dipahami pada esai nya yang ia publikasikan pada tahun 2021 dengan judul *On the Historical Unity of Russians and Ukrainians*. Pada esai tersebut, ia menekankan pentingnya mengingat keterkaitan sejarah, budaya, dan agama antara Rusia, Ukraina dan Belarus. Narasi ini menjelaskan bahwa Putin ingin mengembalikan ikatan tersebut dalam suatu kesatuan wilayah yang memiliki persamaan ideologi. Retorika nasionalis Putin terpusat pada konsep 'nilai tradisional', secara konsisten di beberapa pernyataan publik yang menunjukkan bahwa Rusia akan mempertahankan nilai-nilai ini. Konsep ini kemudian ia jadikan sebagai alasan untuk menjustifikasi invasi ke Ukraina pada pidato deklarasi perang pada tahun 2021. Berdasarkan penjelasan ini, maka Vladimir Putin merupakan pemimpin dengan nasionalisme yang tinggi (*high nationalism*).

b. Belief in Ability to Influence or Control Events

Vladimir Putin termasuk pemimpin yang lebih memilih untuk mengambil alih kendali di berbagai situasi. Hal ini dibuktikan dengan dua alasan. Pertama, Putin telah berkuasa di Rusia selama 25 tahun masa jabatan. Keberhasilan mempertahankan kekuasaan ini menunjukkan bahwa ia merupakan pemimpin yang bisa meyakinkan para pejabat politik Rusia untuk memercayai dirinya sebagai satu-satunya yang bisa memimpin Rusia. Kedua, ideologi yang dianut oleh Vladimir Putin mempengaruhi bentuk kebijakan domestik dan luar negeri Rusia. Pada tingkat domestik, kepemimpinan Putin mengubah Rusia menjadi negara yang sangat menolak tren dan budaya-budaya barat seperti kesetaraan gender, *Childfree*, dan LGBTQ. Kemudian pada kebijakan luar negeri penggunaan konsep 'nilai tradisional' sebagai alasan untuk menginvasi Ukraina, memperkuat bahwa Putin memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan luar negeri Rusia.

c. Need for Power and Influence

Putin merupakan pemimpin yang ingin membangun kontrol dan dominasi agar Rusia menjadi negara kekuatan regional (*regional power*). Upaya Putin untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya didasarkan pada pandangan *zero-sum* terhadap dunia, yang berarti setiap peningkatan pengaruh Barat di negara-negara Eropa Timur merupakan kerugian bagi Rusia dan sebaliknya.

Hal ini bisa dibuktikan dengan dua kebijakan luar negerinya, yaitu Aneksasi Krimea tahun 2014 dan Invasi Ukraina tahun 2021. Dari dua kebijakan itu, Putin ingin menghalangi Amerika Serikat dan sekutunya untuk mendapatkan Ukraina.

d. Conceptual Complexity

Analisis terhadap pernyataan publik dan justifikasi kebijakan Vladimir Putin menunjukkan tingkat kompleksitas konseptual yang relatif rendah dalam pandangannya tentang dunia, terutama terkait hubungan internasional. Hal ini karena pandangannya terhadap dunia yang *zero-sum*.

Pada setiap pernyataan publik yang membahas posisi geopolitik Rusia, Putin selalu menjelaskan bahwa Rusia hanya diberikan dua pilihan pada konstelasi politik internasional modern, yaitu mengikuti keinginan Barat atau mempertahankan nilai

dan kepentingan Rusia. Secara implisit, Putin selalu melihat permasalahan dan ancaman yang dihadapi pada aspek geopolitik melalui klasifikasi biner seperti paradigme baik-buruk, hitam-putih, dan teman-musuh (Lewoema & Arisanto, 2024).

e. *Distrust of Others*

Indikator ini menyangkut pada kecenderungan pemimpin terhadap tindakan dan niat orang atau negara lain. Pidato Vladimir Putin pada Konferensi Munich tahun 2008 dapat menjelaskan bagaimana kecurigaan Putin terhadap ekspansi NATO. Pada konferensi tersebut, Putin mempertanyakan tujuan dan hasil yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Kemudian, Putin juga memperlihatkan sifat kecurigaan ini pada dua gerakan sipil yang terjadi di Ukraina, yaitu pada *Orange Revolution* dan revolusi *Euromaidan*. Menurutnya, dua gerakan ini didalangi oleh kekuatan Barat untuk mendestabilisasi Ukraina dan menempatkan rezim yang anti-Rusia.

f. *Need for Affiliation*

Pidato Vladimir Putin di Konferensi Munich 2008 menunjukkan bahwa Putin telah menganggap jalan diplomatik untuk menyelesaikan krisis keamanan Eropa merupakan hal yang sia-sia. Ia menganggap Amerika Serikat dan sekutunya tidak menganggap serius tentang peringatan dan tuntutan Rusia tentang garis merah (*red line*) yang tidak bisa di toleransi lagi. Hal ini menjadi faktor alasan Putin untuk menggunakan kekuatan militer pada aneksasi Krimea dan perang Ukraina.

Berdasarkan uraian indikator kepemimpinan diatas, Vladimir Putin dikategorikan sebagai pemimpin yang agresif karena menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan, kompleksitas konseptual yang rendah, ketidakpercayaan yang signifikan terhadap orang lain, kecenderungan nasionalis yang kuat, dan kepercayaan diri pada kemampuan mereka untuk mengendalikan peristiwa di mana mereka berpartisipasi.

CONCLUSION

Peran Vladimir Putin dalam proses Sekuritisasi Nilai Tradisional untuk menjustifikasi invasi Rusia ke Ukraina tahun 2021, bertujuan untuk membangun persepsi kepada publik bahwa kebijakan invasi ke Ukraina merupakan tindakan melindungi Rusia dari ancaman nilai-nilai liberal Barat. Putin memanfaatkan kegiatan publik seperti konferensi, wawancara, dan rapat untuk menyebarkan gagasan pentingnya menjaga 'nilai tradisional' Rusia. Awal penggunaan konsep Nilai Tradisional oleh Vladimir Putin bertujuan untuk membedakan ideologi Barat dan Rusia, yang kemudian berkembang menjadi objek rujukan (*referent object*) yang terancam oleh nilai-nilai liberal Barat.

Berdasarkan Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri, kebijakan invasi ke Ukraina dapat memberikan keuntungan yang strategis bagi Rusia sebagai kekuatan regional (*regional power*) karena dapat mempertahankan Ukraina sebagai wilayah pembatas antara Rusia dan NATO. Kebijakan invasi ke Ukraina selaras dengan hasil analisis idiosinkratik yang menunjukkan Vladimir Putin dikategorikan sebagai pemimpin yang agresif. Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep normatif seperti Nilai Tradisional sering dimanfaatkan oleh pemimpin negara untuk menjustifikasi kebijakan yang kontroversial dan melanggar nilai-nilai normatif seperti perang Rusia-Ukraina.

Hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat Indonesia untuk memahami manipulasi narasi yang dapat dilakukan oleh pemimpin negara. Oleh karena itu, bagi Pemerintah Indonesia disarankan untuk meningkatkan kualitas relasi publik agar supaya informasi mengenai kebijakan yang dinilai kontroversial dapat dipahami seutuhnya dan sejelas-jelasnya oleh masyarakat. Pada tingkat konseptual, diperlukannya kerangka analisa pada Teori Sekuritisasi yang dapat menjelaskan bagaimana pernyataan dari aktor sekuritisasi dapat mempengaruhi target audiens. Untuk pemangku kebijakan, khususnya Presiden Republik Indonesia dan Kementrian Luar Negeri Indonesia untuk lebih mengedepankan kepentingan nasional Indonesia pada konteks hubungan Indonesia dan Rusia. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak termanipulasi dari narasi sekuritisasi oleh Pemimpin Rusia. Penulis mengakui bahwa penelitian ini terdapat kekurangan, untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan fokus analisa terhadap dampak yang ditimbulkan bagi audiens atau masyarakat akibat proses sekuritisasi.

REFERENCES

- Windhausen, J. (2022). *Vladimir the Great*. Dipetik May 25, 2025, dari EBSCO: <https://www.ebsco.com/research-starters/biography/vladimir-great>
- Appels, S. (2024, July 9). *Russkiy Mir Discourse: A Comparative Analysis of Ukraine and Kazakhstan*. Dipetik May 25, 2025, dari The digital archive of the University of Tartu (ADA): <https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/9c828de4-87a4-4c62-88de-6fa9f10a3c04/content>
- Associated Press. (2024, August 6). *Putin calls for a project to promote 'traditional Russian values' overseas*. Diambil kembali dari AP News: <https://apnews.com/article/russia-putin-values-overseas-promotion-kremlin-4c83419b45a9801266decb7ef3b28b53>
- Batubara, S., Rosyidin, M., & Hanura, M. (2021). PENGARUH IDIOSINKRATIK JUSTIN TRUDEAU DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA: STUDI KASUS PENERIMAAN PENGUNGGI SURIAH. *Journal of International Studies*, 6(1), 172-196. doi:10.24198/intermestic.v6n1.9
- BBC. (2024, February 23). *What are the sanctions on Russia and have they affected its economy?* Dipetik May 25, 2025, dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659>
- Beehner, L. (2022, September 9). *Putin Is Trying to Turn Ukraine Into a Culture War*. Dipetik March 4, 2024, dari Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2022/09/09/putin-russia-ukraine-culture-war-conservative-values/>
- Bell, M. (2024, March 25). *Russia country profile*. Dipetik June 3, 2025, dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-17839672>
- Britannica. (2025, May 23). *Russian Orthodox Church*. Dipetik June 3, 2025, dari Britannica: <https://www.britannica.com/topic/Russian-Orthodox-Church>
- Chankseliani, M., & Belkina, E. (2024). Academic Exodus from Russia: Unraveling the Crisis. *Journal of Comparative & International Higher Education*, 97-105. doi:10.32674/jcihe.v16i3.6304

- Chkhaidze, N. (2024, March 19). *Vladimir Putin's history obsession is a threat to world peace*. Dipetik May 25, 2025, dari Atlantic Council: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/vladimir-putins-history-obsession-is-a-threat-to-world-peace/>
- Council on Foreign Relations. (2022, February 22). *A historical timeline of post-independence Ukraine*. Dipetik March 4, 2025, dari Public Broadcasting Service (PBS): <https://www.pbs.org/newshour/world/a-historical-timeline-of-post-independence-ukraine>
- Culverwell, D., & Denisova, K. (2025, May 28). *Economy Minister: Occupied Ukrainian territories have over \$350 billion in natural resources*. Dipetik May 25, 2025, dari Kyiv Independent: <https://kyivindependent.com/economy-minister-occupied-ukrainian-territories-have-over-350-billion-in-natural-resources/>
- Cuomo, I., & Latypova, L. (2022, March 22). *Fear of Popular Revolutions Drove Putin to Attack Ukraine*. Dipetik March 4, 2025, dari New Lines Institute: <https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/authoritarianism/fear-of-popular-revolutions-drove-putin-to-attack-ukraine/>
- Davidenko, M., & Utkina, V. (2024). The Conservative Turn in Post-Soviet Russia. *Europe-Asia Studies*, 76(2), 135-148. doi:<https://doi.org/10.1080/09668136.2024.2325774>
- Dickinson, P. (2020, November 22). *How Ukraine's Orange Revolution shaped twenty-first century geopolitics*. Dipetik March 4, 2025, dari Atlantic Council: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-ukraines-orange-revolution-shaped-twenty-first-century-geopolitics/>
- Doig, S. (2023, August 11). *Viktor Yanukovich: Ukraine's scandal-ridden ex-president*. Dipetik May 24, 2025, dari Kyiv Independent: <https://kyivindependent.com/viktor-yanukovich-ukraines-scandal-ridden-ex-president/>
- Domańska, M. (2024). *Lost in Translation: Western Misconceptions about Putin's Russia*. Washington: Center for European Policy Analysis (CEPA). Dipetik March 2, 2025, dari <https://cepa.org/comprehensive-reports/lost-in-translation-western-misconceptions-about-putins-russia/>
- Düben, B. (2023). Revising History and 'Gathering the Russian Lands': Vladimir Putin and Ukrainian Nationhood. *LSE Public Policy Review*, 3(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.31389/lseppr.86>
- Elvira, N. (2021). Dilema Aliansi Keamanan Korea Selatan-Amerika Serikat: Studi kasus penempatan THAAD di Korea Selatan. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 71-102. doi:<https://doi.org/10.25077/fetrian.3.2.71-102.2021>
- Eurostat. (2024, June 2024). *Natural gas supply statistics*. Dipetik June 1, 2025, dari Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_supply_statistics
- Ferris, E. (2025, February 4). *Beyond Ukraine: Russia's Foreign Policy Challenges in 2025*. Dipetik March 3, 2025, dari The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies: <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/beyond-ukraine-russias-foreign-policy-challenges-2025>

- Fratsyvir, A. (2025, April 28). *Russia demands recognition of Crimea, other Ukrainian regions' annexation in any peace talks*. Dipetik May 26, 2025, dari The Kyiv Independent: <https://kyivindependent.com/russia-still-demands-control-of-five-ukrainian-regions-as-condition-for-peace-talks-fm-lavrov-says/>
- Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2024*. Dipetik June 3, 2025, dari Freedom House: <https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2024>
- Fried, D., & Volker, K. (2022, February 18). *The Speech In Which Putin Told Us Who He Was*. Dipetik May 24, 2025, dari Politico: <https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/18/putin-speech-wake-up-call-post-cold-war-order-liberal-2007-00009918>
- Glantz, M. (2023, May 10). *What You Need to Know About Russia's New Foreign Policy Concept*. Dipetik March 3, 2025, dari United States Institute of Peace: <https://www.usip.org/publications/2023/05/what-you-need-know-about-russias-new-foreign-policy-concept>
- Gotz, E., & Mcfaul, M. (2021). Correspondence: The Power of Putin in Russian Foreign Policy. *International Security*, 196-200. Dipetik May 25, 2025, dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Correspondence%3A-The-Power-of-Putin-in-Russian-G%C3%B6tz-Mcfaul/b6a4ccab9fef642b03897eb5935ba77054fc16a7>
- Graham, T. (2024, May 16). *What Does Putin Really Want in Ukraine?* Dipetik February 26, 2025, dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/expert-brief/what-does-putin-really-want-ukraine>
- Hadiwinata, B. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Dipetik March 4, 2025
- Henke, N. (2021). Identity and Nation-Building in Ukraine: Reconciliation of Identities from a Conflict Prevention Perspective. *European Centre for Minority Issues (ECMI)*, 1-31. Dipetik March 4, 2025, dari <https://www.ecmi.de/publications/ecmi-research-papers/125-identity-and-nation-building-in-ukraine-reconciliation-of-identities-from-a-conflict-prevention-perspective>
- Hill, A. (2025, March 12). *Why Russia's armed forces have proven resilient in the war in Ukraine*. Dipetik May 25, 2025, dari The Conversation: <https://theconversation.com/why-russias-armed-forces-have-proven-resilient-in-the-war-in-ukraine-251588>
- Ivshina, O. (2025, May 5). *How Russia took record losses in Ukraine in 2024*. Dipetik May 25, 2025, dari BBC: <https://www.bbc.com/news/articles/c5yg4z6v600o>
- Jones, S. (2025, March 18). *Russia's Shadow War Against the West*. Dipetik May 26, 2025, dari Centre for Strategic and International Studies: <https://www.csis.org/analysis/russias-shadow-war-against-west>
- Kanet, R. (2021). The Rebuilding of "Greater Russia": From Kievan Rus' to the Eurasian Union (Note 1). *Advances in Politics and Economics*, 22-43. doi:<https://doi.org/10.22158/ape.v4n2p22>

- Kollmann, N. (2021). "A Unitary State of Difference?": 1st Contribution to the Forum about Forging a Unitary State: Russia's Management of the Eurasian Space. *Russian History*, 48(1), 1-10. Dipetik June 3, 2025, dari <https://www.jstor.org/stable/27249072>
- Komin, M. (2024, June 18). *Late-stage Putinism: The war in Ukraine and Russia's shifting ideology*. Dipetik March 3, 2025, dari European Council On Foreign Relations: <https://ecfr.eu/publication/late-stage-putinism-the-war-in-ukraine-and-russias-shifting-ideology/>
- Kotov, A. (2022). Current Challenges for German Business in the Russian Market. *Her Russ Acad Sci*, 340-345. doi:<https://doi.org/10.1134/S1019331622100094>
- Kremlin. (2021, July 12). *Article by Vladimir Putin "On the Historical Unity of Russians and Ukrainians"*. Dipetik March 3, 2025, dari Kremlin: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181>
- Kryzhanivsky, S., & Hajda, L. (2025). *Ukraine*. Dipetik June 3, 2025, dari Britannica: <https://www.britannica.com/place/Ukraine>
- KSE Institute. (2025). *Seven more international companies exited Russia in April 2025 — KSE Institute*. Kyiv: Kyiv School of Economics. Dipetik May 26, 2025, dari <https://kse.ua/about-the-school/news/seven-more-international-companies-exited-russia-in-april-2025-kse-institute/>
- Laruelle, M. (2024, March 22). *Russia's Ideological Construction in the Context of the War*. Dipetik March 2, 2025, dari French Institute of International Relations : https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/ifri_laruelle_russia_ideology_2024.pdf
- Lefebvre, M. (2022, August 8). *'Russia and Ukraine have their roots in the Kyiv Empire'*. Dipetik June 3, 2025, dari Le Monde: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/08/08/russia-and-ukraine-have-their-roots-in-the-kyiv-empire_5992842_4.html#
- Lewoema, G., & Arisanto, P. (2024). Pengaruh Faktor Idiosinkratik Matteo Salvini Dalam Kebijakan Luar Negeri "Salvini Decree" Italia 2018. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 438-452. doi:<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2905>
- Massaguni, M., Badu, M., & Sallatu, M. (2022, February 1). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 43-67. doi:<https://doi.org/10.31947/hjirs.v2i1.21011>
- Masters, J. (2023, February 14). *Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia*. Dipetik February 25, 2025, dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia>
- McCauley, M., & Conquest, R. (2025, January 17). *Soviet Union*. Dipetik June 3, 2025, dari Britannica: <https://www.britannica.com/place/Soviet-Union>
- McCourt, D. (2022). *THE NEW CONSTRUCTIVISM IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY*. Bristol: Bristol University Press. Dipetik March 5, 2025
- Medinsky, V. (2021, April 29). *Every fifth person: The USSR's loss of civilian, military life during World War II*. Dipetik June 3, 2025, dari The Jakarta

- Post: <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/04/28/every-fifth-person-the-ussrs-loss-of-civilian-military-life-during-world-war-ii-.html>
- Mikelis, K. (2021). Securitization: Theoretical Underpinnings and Implications. Dalam G. Voskopoulos, *European Union Security and Defence* (hal. 39-54). Springer Cham. Dipetik March 4, 2025
- Myerson, R. (2023, July 1). *Perspectives on Ukraine and the Russian Invasion*. Dipetik March 4, 2025, dari Global ECCO's (Education Community Collaboration Online): <https://nps.edu/web/ecco/-/perspectives-on-ukraine-and-the-russian-invasion>
- NATO. (2025, February 17). *NATO's response to Russia's invasion of Ukraine*. Dipetik May 2025, 26, dari Nato: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm
- Ningsih, W., & Nailufar, N. (2021). *Bolshevik, Cikal Bakal Partai Komunis Uni Soviet*. Dipetik June 3, 2025, dari Kompas: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/09/120000379/bolshevik-cikal-bakal-partai-komunis-uni-soviet>
- Nunez, R. (2022). Chapter 28: A brief glance into qualitative methods for international relations. Dalam R. Huddleston , T. Jamieson, & P. Jam, *Handbook of Research Methods in International Relations* (hal. 529-547). Elgar Online. doi:<https://doi.org/10.4337/9781839101014.00040>
- O'Hagan, J. (2023). The 'West' in International Relations. Dalam M. Bukovansky, *The Oxford Handbook of History and International Relations* (hal. 768). New York: Oxford University Press. doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198873457.001.0001>
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2025). *Civilian Harm and Human Rights Abuses Persist in Ukraine as War Enters Fourth Year*. UN Human Rights Monitoring Mission. Dipetik March 4, 2025, dari <https://ukraine.ohchr.org/en/Civilian-Harm-and-Human-Rights-Abuses-Persist-in-Ukraine-as-War-Enters-Fourth-Year>
- Osborn, A., & Ostroukh, A. (2021, December 13). *Putin rues Soviet collapse as demise of 'historical Russia'*. Dipetik March 4, 2025, dari Reuters: <https://www.reuters.com/world/europe/putin-rues-soviet-collapse-demise-historical-russia-2021-12-12/>
- Person, R., & McFaul, M. (2022). What Putin Fears Most. *Journal of Democracy*, 33(2), 18-27. Dipetik 2025, dari <https://www.journalofdemocracy.org/articles/what-putin-fears-most/>
- Pradnyana, I. P. (2023). THE PATH OF SECURITIZATION: TRANSFORMATION OF FREE PAPUA MOVEMENT (OPM)TERMINOLOGY FROM ARMED CRIMINAL GROUPS TO SEPARATIST AND TERRORIST GROUPS. *Journal of Terrorism Studies*, 5(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.7454/jts.v5i1.1062>
- Rachman, G. (2022). *Understanding Vladimir Putin, the man who fooled the world*. Dipetik June 3, 2025, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2022/apr/09/understanding-vladimir-putin-the-man-who-fooled-the-world>

- Rahn, W. (2019, June 28). *Putin: Liberal idea has 'outlived its purpose'*. Dipetik May 24, 2025, dari DW: <https://www.dw.com/en/vladimir-putin-interview-liberal-idea-has-outlived-its-purpose/a-49384176>
- Ray, M. (2025). *Vladimir Putin*. Dipetik June 3, 2025, dari Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin>
- Robinson, N. (2024, March 27). *Professor Robinson: Evolution of Putinism as 'Collective Putin' Reshapes Russian Politics*. Dipetik March 3, 2025, dari The European Center for Populism Studies: <https://www.populismstudies.org/professor-robinson-evolution-of-putinism-as-collective-putin-reshapes-russian-politics/>
- Rohman, S., Napang, M., & Nurhasanah, S. (2021). Persaingan dan Pengaruh Strategis Rusia-NATO di Eropa. *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik*, 111-132. Dipetik May 25, 2025, dari <https://media.neliti.com/media/publications/521964-russia-nato-strategic-rivalry-and-influe-56c944ce.pdf>
- Rumer, E., & Weiss, A. (2021, November 12). *Ukraine: Putin's Unfinished Business*. Dipetik May 23, 2025, dari Carnegie Endowment for International Peace: <https://carnegieendowment.org/research/2021/11/ukraine-putins-unfinished-business?lang=en>
- Saeri, M., Jamaan, A., Surez, M., Gayatri, P., Utami, H., & Zarina. (2023). KONFLIK RUSIA-UKRAINA TAHUN 2014-2022. *Dinamika Global*, 8(2), 319-334. doi:<https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1887>
- Shahir, M., & Boghairi, A. (2024). Constructivist analysis of Russia's Military Invasion of Ukraine (2022). *Journal of World Sociopolitical Studies*, 8(4), 841-876. doi:10.22059/wsp.2025.379457.144
- Shatz, H., & Reach, C. (2023). *The Cost of the Ukraine War for Russia*. RAND. Dipetik May 25, 2025, dari https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2421-1.html
- Składanowski, M. (2024). Russian Criticism of Western Liberal Democracy: A Security Perspective. *Studia Rossica Gedanensia*, 11, 275-285. doi:<https://doi.org/10.26881/srg.2024.11.13>
- Snegovaya, M., Kimmage, M., & McGlynn, J. (2023). *The Ideology of Putinism: Is It Sustainable?* New York: Centre for Strategic and International Studies. Dipetik March 4, 2025, dari <https://www.csis.org/analysis/ideology-putinism-it-sustainable>
- Sulaeman, F., & Tiara, N. (2021). Kebiasaan Baru Hubungan Internasional: Potensi Kebijakan Luar Negeri Joe Biden terhadap Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 151-166. doi:<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.384>
- TASS. (2024, March 3). *Traditional values shared by most people on Earth — Putin*. Dipetik May 23, 2025, dari TASS Russian News Agency: <https://tass.com/politics/1754789>
- Tempo. (2022, Agustus 27). *Eropa Krisis Energi, Rusia Malah Bakar Gas Alam Rp148 Miliar Per Hari*. Dipetik June 1, 2025, dari Tempo: <https://www.tempo.co/internasional/eropa-krisis-energi-rusia-malah-bakar-gas-alam-rp148-miliar-per-hari-300420>

- Tsurkan, K. (2024, November 22). *'It was my first revolution' — Ukrainians look back on the Orange Revolution 20 years later*. Dipetik February 25, 2025, dari Kyiv Independent: <https://kyivindependent.com/it-was-my-first-revolution-ukrainians-look-back-on-the-orange-revolution-20-years-later/>
- Uvarov, A. (2023, October 5). *Ukraine and Russia: Relations symbolically dismantled*. Dipetik May 26, 2025, dari iddle: <https://ridl.io/ukraine-and-russia-relations-symbolically-dismantled/>
- Wargi, S. (2021). KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA JOKOWI MELALUI DIPLOMASI EKONOMI DALAM UPAYA UNTUK MENGUASAI PASAR HALAL DUNIA. *Indonesian Journal of International Relations*, 320-341. doi:<https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.228>
- Williams, M. (2023, March 6). *How Putin's fear of democracy convinced him to invade Ukraine*. Dipetik March 4, 2025, dari Atlantic Council: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-putins-fear-of-democracy-convinced-him-to-invade-ukraine/>
- Wisniewska, I. (2025, February 28). *The costs of war are driving the economy: Russia's economic situation in 2024*. Dipetik June 3, 2025, dari Centre for Eastern Studies: <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2025-02-28/costs-war-are-driving-economy-russias-economic-situation-2024>
- Woolley, U. (2021). Ukraine and Putin's Post-Soviet Imperialism. *Political Insight*, 15-17. doi:<https://doi.org/10.1177/20419058221091631>
- World Bank. (2020). *Ukraine trade balance, exports and imports*. World Bank. Dipetik May 25, 2025, dari <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/UKR/Year/2020/TradeFlow/EXPIMP>
- Worldometers. (2024). *Population of Russia (2025 and historical)*. Dipetik June 3, 2025, dari Worldometers: <https://www.worldometers.info/world-population/russia-population/>